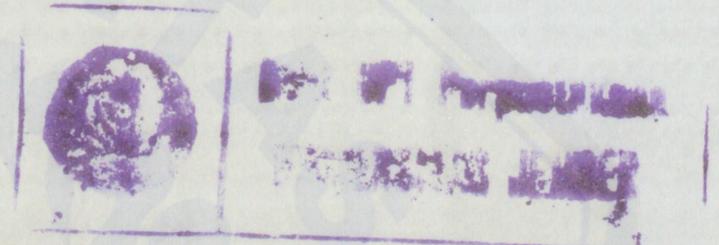


**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN LAPANGAN TERBANG PERINTIS
DI KABUPATEN JEMBER DENGAN PENDEKATAN
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS**

SKRIPSI

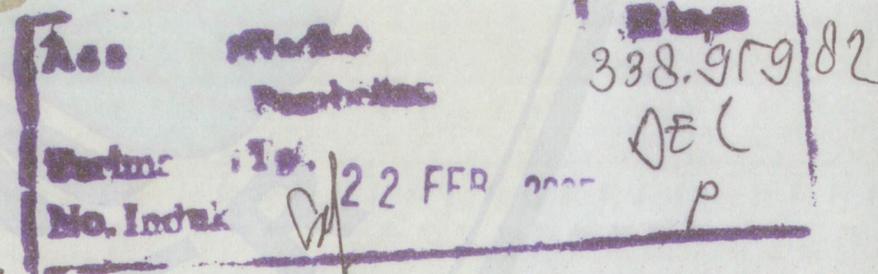
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Oleh :

Delianti

NIM: 000810101373



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2004**

JUDUL SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN LAPANGAN TERBANG
PERINTIS DI KABUPATEN JEMBER DENGAN PENDEKATAN
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : DELIANTI HARYOTO

N. I. M. : 000810101373

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

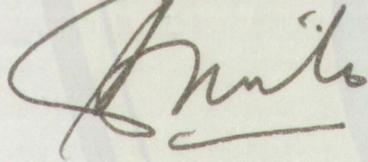
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

18 DESEMBER 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

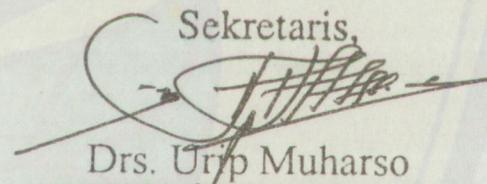
Susunan Panitia Penguji

Ketua,



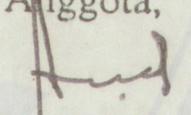
Drs. J. Sugiarto, SU
NIP. 130 610 494

Sekretaris,

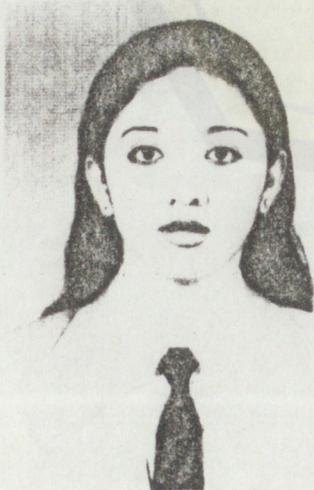


Drs. Urip Muharso
NIP. 131 120 333

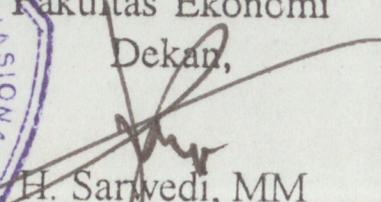
Anggota,



Dr. Rafael Purtono S., M.Si
NIP. 131 793 384



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Lapangan
Terbang Perintis Di Kabupaten Jember Dengan
Pendekatan *Analytic Hierarchy Process*

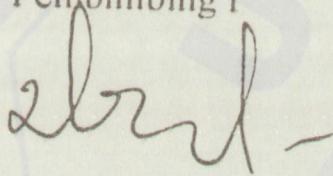
Nama Mahasiswa : Delianti

NIM : 000810101373

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

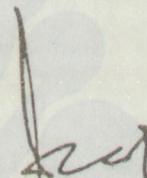
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Regional

Pembimbing I



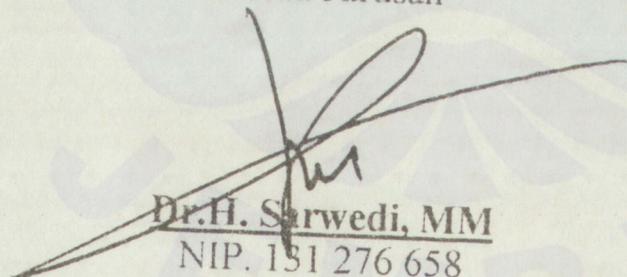
Prof. Dr. H. Harijono, SU
NIP. 131 877 447

Pembimbing II



Dr. Rafael Purতোমো M.Si
NIP. 131 793 384

Ketua Jurusan



Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658

Tanggal Persetujuan : Desember 2004

PERSEMBAHAN

*Dengan Menyebut Nama Allah
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*

Karya Ini Kupersembahkan Kepada :

Ibunda Tercinta yang sangat aku Hormati

“MaMa Sunarwati”

*Yang tak pernah henti mencurahkan kasih sayang,
Memberikan bimbingan, dukungan, dorongan,
keteladanan dan kepercayaan
serta selalu mengiringi setiap langkahku
dengan senyum dan doa yang tulus.
Pengorbanan dan kesabaran mu begitu besar Ma,*

(Thanks Mom, You're the best Mom in the World, I'm proud of You)

Adinda Tersayang yang sangat aku Banggakan

“Adik Aditya Pramono”

*Pengertian, kebersamaan dan kasih sayanglah yang
membuat kita mampu menghadapi semua yang terjadi*

(Thanks Bro, You're the best Brother that I have, Do Your Best)

Almamater ku

Fakultas Ekonomi Universitas Jember

(Be The Best)

M O T T O

Jangan menjanjikan yang lebih besar dari yang Anda berikan
Lebih baik memberikan yang lebih besar dari yang Anda janjikan.
(Gene Belley)

Among the Expectation, the Process and the Target

The Process owning benefit and eternity

(Delianti)

Tidak ada orang yang mengalami keberhasilan
tanpa mengalami kesalahan, kegagalan, dan kekecewaan
(G. Kingsley Ward)

Never Say No Before You Try

and

Never Give Up Before You Get

(Delianti)

ORA ET LA BORA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Skripsi ini berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Di Kabupaten Jember Dengan Pendekatan *Analytic Hierarchy Process*”**

Segala hambatan dan kesulitan yang dialami penulis selama proses penulisan skripsi ini dapat diatasi dan penulis tidak dapat melupakan jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Dr. H. Sarwedi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta staff
2. Prof. DR. Harijono, SU selaku Dosen Pembimbing I dan DR. Rafael Purtono, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang tak pernah lelah dan bosan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.
3. Teguh Hadi SE, M.Si selaku Dosen Wali dan telah banyak membantu penulis dalam proses pengolahan data.
4. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan banyak Ilmu.
5. Mas Untung selaku petugas bagian pendidikan jurusan IESP yang telah banyak membantu dalam hal kearsipan.
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Jember
7. Eyang Putri “Hj. Umi Khasanah” di Magetan, *matur sembah nuwun doa restu nipun*
8. Keluarga besar di Jakarta; Pakpoh H.S. Aliph Gundojati dan Bulik Murwatiningrum, Terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Mbak Narti, Terima kasih atas doa dan dukungannya.

10. Kakak-kakak Ku; Mas Bagus, Mas Farid, Mas Fighan, Mas Umam, Mbak Mila, Mbak Uun, terima kasih atas doa dan motivasinya.
11. Adik-adik di Jakarta; Dik Fajar, Dik Hanief, Dik Tertia dan. canda tawa mu selalu mbak ie rindukan.
12. Keluarga di Jember Bapak Matroeki, Ibu Sri, Mas Wawan dan Dik Fitria, terima kasih atas bantuanya baik moril maupun materi.
13. *My best friends; Putri, Jevi, and Mimin, thanks for our friendship*
14. Teman-teman seperjuangan, Maz Andre, Dik Ayu, Fadil, Heny, Gito, Lusi Cempluk, Ruri, Nita.
15. *The AHP Group; Bung Fuad, Bung Ma'sum, Bung Agung, Non Indah, thanks for our Partnership*
16. Teman-teman IESP angkatan 2000 dan D3 Bahasa Inggris angkatan 2001.
17. Pak Annas, Bu Rita, Pak Kabul dan seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.
18. Pak Agus, Pak Tatok, Maz Risky, Mbak Erna dan Seluruh Kru PT. Soka Radio Adiswara, Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.
19. Penghuni "Green House", Ibu Hariri, Mbak unyil, Dik Wiwik, Dik Fifin, Dik Ira, dan Dik Lucky, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.
20. Imada's members; Dede, Hikmah, Fathur, Beny, *Thanks for togetherness*

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkeinginan menambah wawasan keilmuan.

Jember, November 2004

Penulis

RINGKASAN

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN LAPANGAN TERBANG PERINTIS DI KABUPATEN JEMBER DENGAN PENDEKATAN *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS*

Oleh
DELIANTI

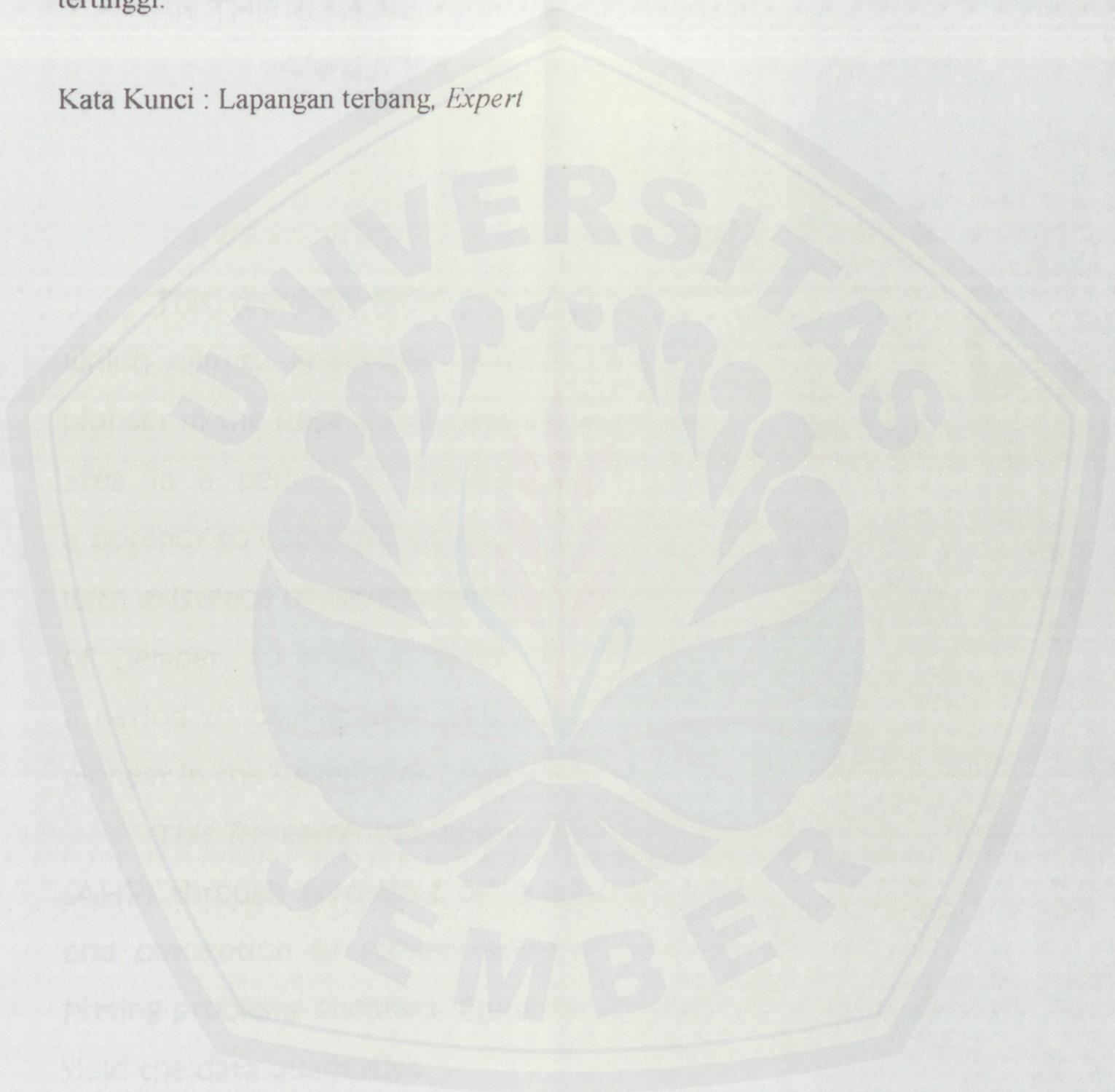
Penelitian ini bersifat *descriptive research* yang bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember terhadap pembangunan ekonomi daerah dimasa mendatang, untuk mengetahui Sektor-sektor yang diharapkan mempunyai potensi terhadap pembangunan ekonomi daerah dimasa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember, untuk mengetahui prioritas kebijakan Pemerintah daerah di masa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) melalui penyebaran kuesioner dengan berusaha menangkap aspirasi dan persepsi masyarakat yang dianggap ahli atau *expert* dan pemegang kebijakan (*policy maker*) mengenai permasalahan yang diteliti. Kuesioner yang ditanggapi oleh responden akan menghasilkan data kualitatif yang dikuantisir.

Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini adalah pembangunan lapangan terbang perintis akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan dampak sosial maupun lainnya. Hal ini ditunjukkan dari nilai *eigen value* faktor ekonomi yang paling besar, dibanding kedua faktor lainnya. Sektor-sektor di bidang ekonomi, terutama pendapatan perkapita masyarakat dan PDRB serta kesempatan kerja, perdagangan, industri, pariwisata dan pemanfaatan lahan tidur. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pendapatan per kapita masyarakat dan PDRB menjadi prioritas sektor yang berpotensi dan

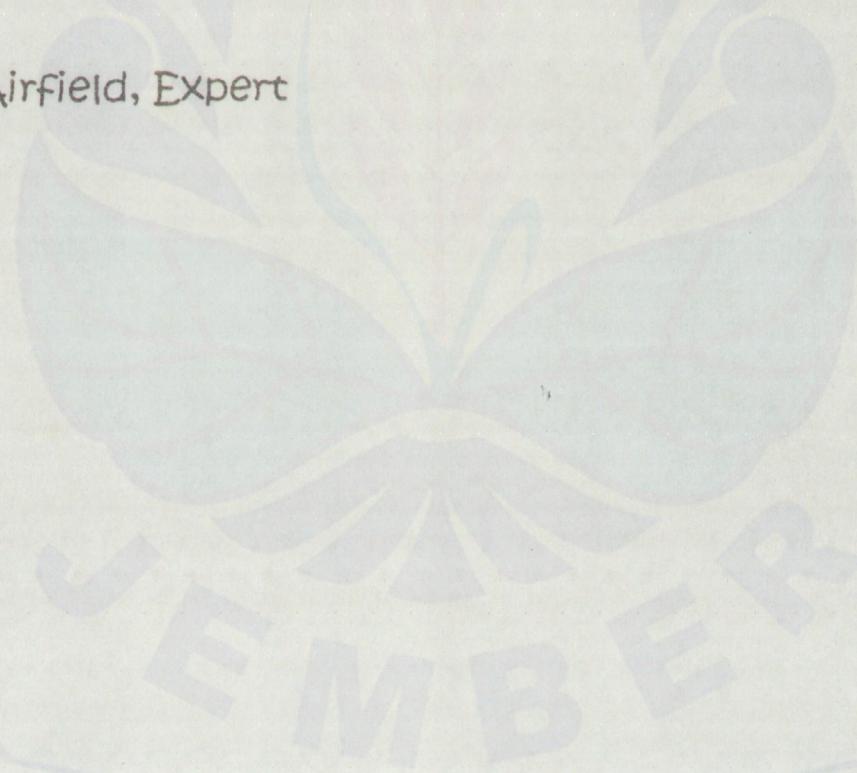
paling diharapkan. Kebijakan pembangunan seimbang yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan adanya pembangunan lapangan terbang. Kebijakan tersebut didasari kriteria ekonomi, sosial dan lainnya, dimana hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan seimbang menjadi prioritas tertinggi.

Kata Kunci : Lapangan terbang, *Expert*



from value of Eigen value factor of biggest economics, compared by second of factor of another sector in economic area, especially earnings of per capita socialize and PDRB and the opportunity work, commerce, industrial, tourism and exploiting of farm sleep. Result of analysis show that sector of earnings per capita socialize and PDRB become priority of sector that have the potency and most expected. Policy of well-balanced Development which must be done/conducted by local government of Regency of Jember to more improve growth of economy with existence of airfield development. The policy constituted by the economic criterion, social and other, where end result of this research indicate that policy of well-balanced development become highest priority.

Key word: Airfield, Expert



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya	8
2.2 Landasan Teori	9
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	25
3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	25
3.3 Metode Analisis Data	26
3.4 Definisi Variabel Operasional	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

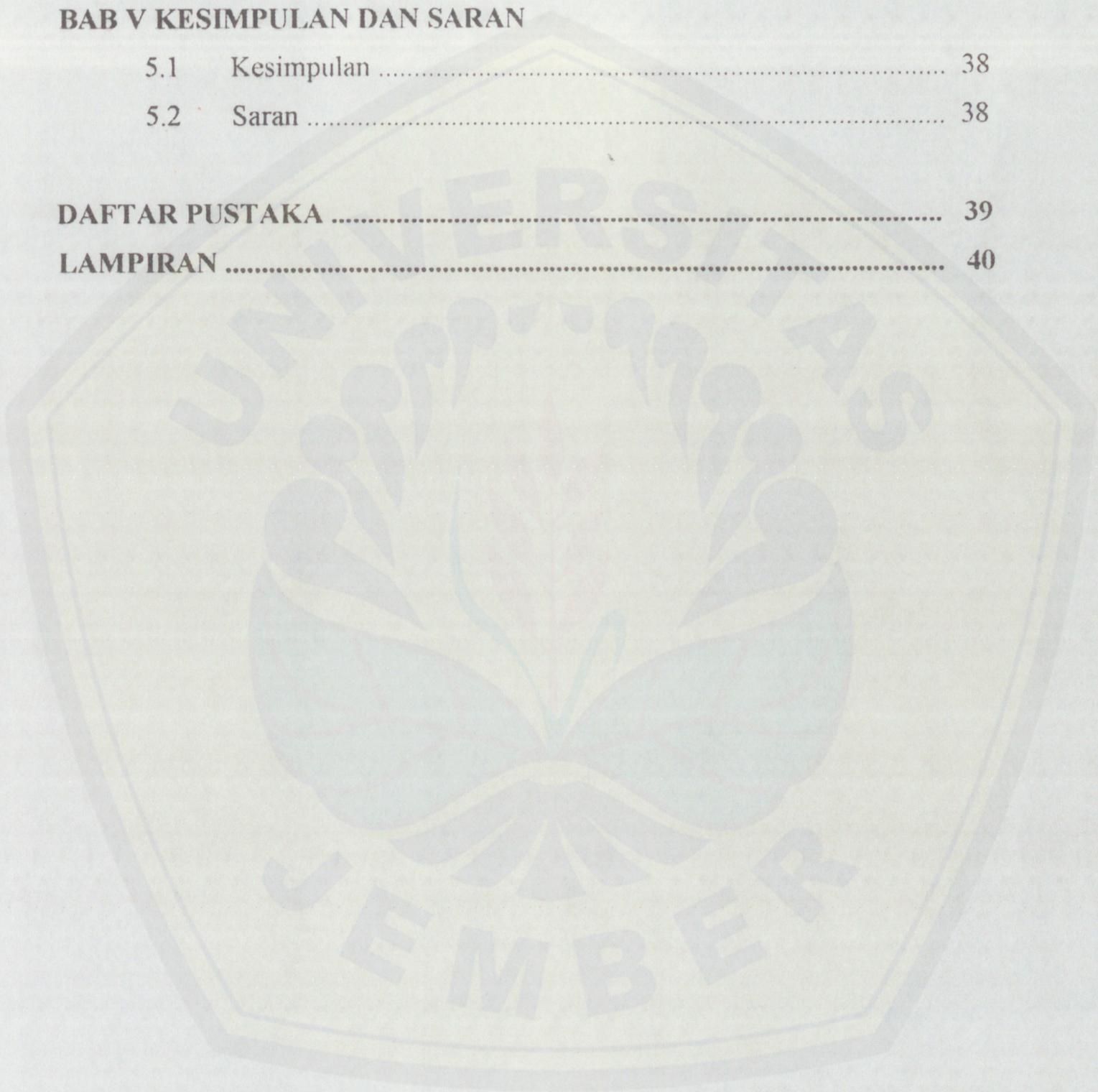
4.1	Gambaran Umum	29
4.2	Analisis Data	33
4.3	Pembahasan Hasil Perhitungan	36

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	38
5.2	Saran	38

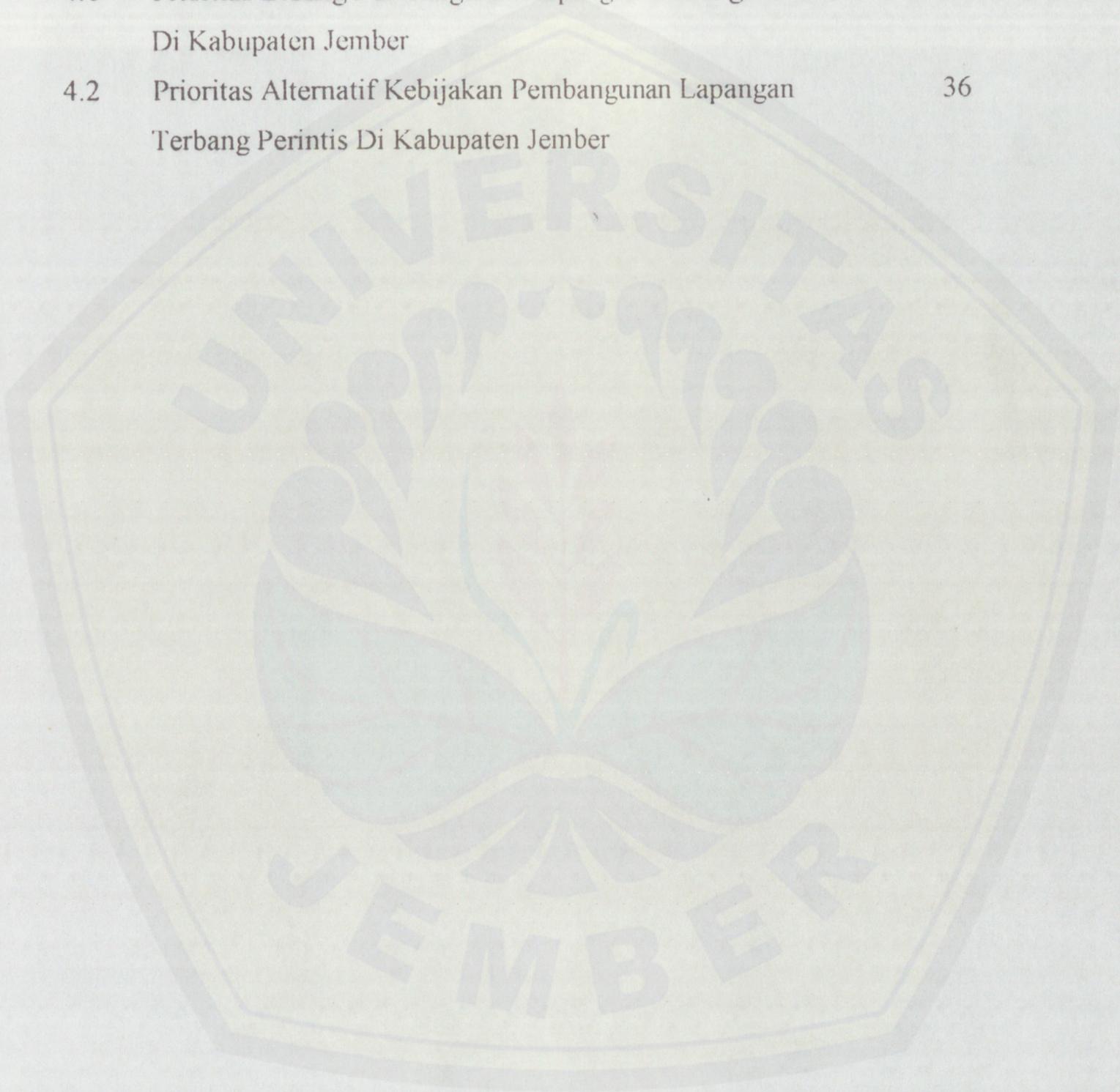
DAFTAR PUSTAKA	39
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	40
-----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Skala Preferensi <i>Analytic Hierarchy Process</i>	18
2.2	Indeks Random	21
4.1	Prioritas Bidang Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Di Kabupaten Jember	34
4.2	Prioritas Alternatif Kebijakan Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Di Kabupaten Jember	36



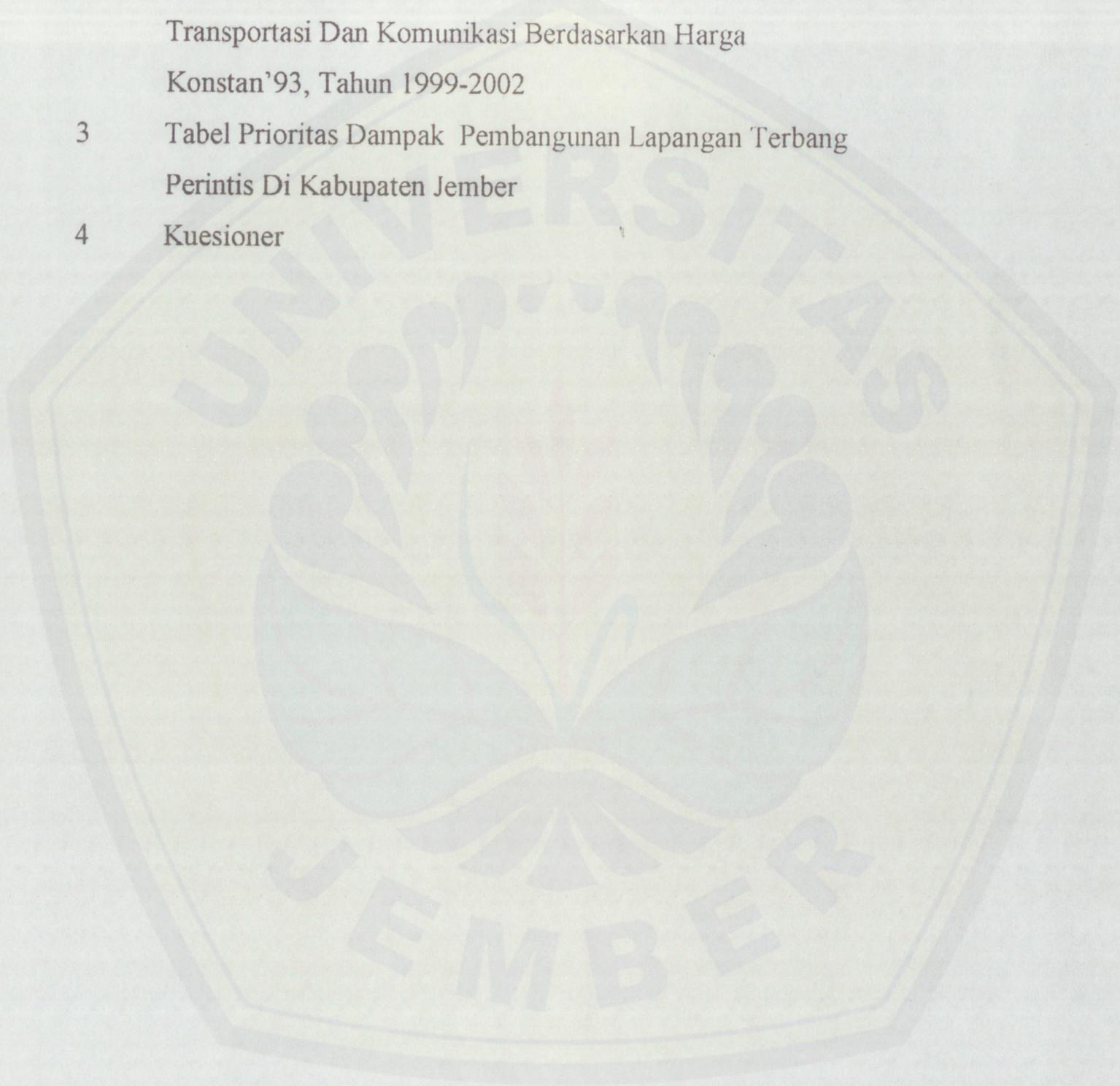
DAFTAR GAMBAR

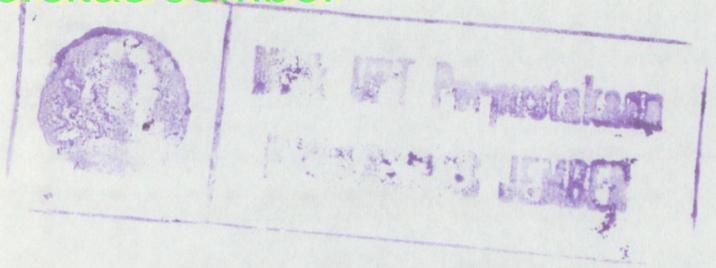
Gambar		Halaman
1.1	Grafik Nilai PDRB Sektor Transportasi Dan Komunikasi, Tahun 1999 – 2002	4
1.2	Grafik Pertumbuhan Sektor Transportasi Dan Komunikasi Tahun 1999 - 2002	4
1.3	Grafik Distribusi Persentase PDRB Subsektor Transportasi Dan Komunikasi Berdasarkan Harga Konstan '93 Tahun 1999 - 2002	5
2.1	Berbagai Keuntungan <i>Analytic Hierarchy Process</i>	16
2.2	Hirarki Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Di Kabupaten Jember	22
3.1	Aplikasi Metode <i>Analytic Hierarchy Process</i>	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Tabel Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Jember
Atas Dasar Harga konstan'93, Tahun 1999-2002
- 2 Tabel Distribusi Presentase PDRB Subsektor
Transportasi Dan Komunikasi Berdasarkan Harga
Konstan'93, Tahun 1999-2002
- 3 Tabel Prioritas Dampak Pembangunan Lapangan Terbang
Perintis Di Kabupaten Jember
- 4 Kuesioner





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagi suatu negara sedang berkembang pembangunan ekonomi merupakan instrumen utama dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi sebagai proses multidimensional meliputi perubahan organisasi dan orientasi seluruh sistem sosial dan ekonomi (Todaro, 1987:614). Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Perencanaan pembangunan merupakan upaya mengubah keadaan ekonomi esok suatu negara berkembang agar jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya (Sanusi, 2000:15). Ciri suatu perencanaan pembangunan bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan (*development objectives*) berkaitan dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*) (Bintoro, 1995:49). Tujuan pembangunan yaitu (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (b) Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. (c) Meningkatkan kesempatan kerja. (d) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah. Dalam merealisasikan keberhasilan pembangunan nasional sangatlah ditentukan oleh pembangunan regional di wilayah nasional. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah seperti yang tertera dalam tujuan dan sasaran PROPENAS 2002-2004 yaitu pembangunan diarahkan untuk mendukung upaya pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dengan meningkatkan pembangunan daerah dan mempercepat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. (Kunarjo, 2002:24).

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah bersama sektor swasta berupaya menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Arah kebijakan/tujuan pembangunan daerah adalah mengembangkan otonomi yang

luas, nyata, dan bertanggung jawab; melakukan pengkajian atas kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah bagi propinsi, kabupaten/kota, dan desa: mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengolahan sumberdaya; serta memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan keadaan Indonesia dewasa ini dan arahan GBHN 1999-2004, tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan adalah (1). Mementapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisien serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat; (2). Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi daerah, pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan. Pengembangan pemukiman serta pengolahan penataan ruang dan pertanahan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan, dan sekaligus mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah; (3). Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, dan peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. (Ekojaya, 2001:43).

Keberhasilan pembangunan yang terus menerus dan saling terkait antara pembangunan pusat dan daerah, tidaklah terlepas ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan. Pengembangan sektor-sektor yang dinilai strategis di daerah tidak akan dapat tumbuh tanpa adanya dukungan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai. Pengembangan sarana dan prasarana memberi dampak yang sangat berarti bagi pembangunan disegala bidang baik di tingkat nasional maupun regional.

Gejala dari suatu negara maju dan makmur minimal harus memiliki tiga kriteria pokok yakni memiliki sumber daya alam yang potensial, sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana transportasi yang lancar dan berkembang.

Sebagai negara kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang tersebar di sepanjang khatulistiwa antara 94 derajat dan 142 derajat bujur timur, dan antara 8 derajat lintang utara dan 12 derajat lintang selatan. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.500 km dan terletak diantara samudera Indonesia disebelah barat dan samudera pasifik disebelah timur. Keadaan geografis Indonesia menggambarkan adanya keanekaragaman potensi sumber daya alam, iklim, ekonomi maupun sumber daya manusia. Melihat keadaan geografis Indonesia, salah satu sarana yang dirasakan sangat vital didalam pembangunan adalah sarana transportasi pengangkut dan pendistribusian barang dan manusia keseluruhan wilayah Indonesia dan keluar negeri.

Transportasi merupakan urat nadi dalam pembangunan perekonomian. Sarana transportasi memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan regional. Karena itu pembangunan transportasi terus mendapat prioritas tinggi dalam program pembangunan nasional Indonesia. Transportasi memiliki peranan dan fungsi yang strategis selain menghubungkan dua tempat yang berjauhan (*spatial linkage*) juga sebagai penunjang dan penopang kegiatan-kegiatan ekonomi (*promoting and servicing sector*). Tersedianya fasilitas sarana transportasi diharapkan dapat menunjang berbagai aktivitas ekonomi suatu daerah atau wilayah .

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi nomor tiga setelah Surabaya dan Malang serta memiliki tingkat PDRB tertinggi di satuan wilayah pembangunan IV (Jember, Bondowoso, Situbondo). Pada tahun 2002 PDRB atas harga berlaku di Kabupaten Jember adalah sebesar 7.698.451,75 sedangkan PDRB atas harga konstan adalah sebesar 2.042.435,38.(Lampiran 1)

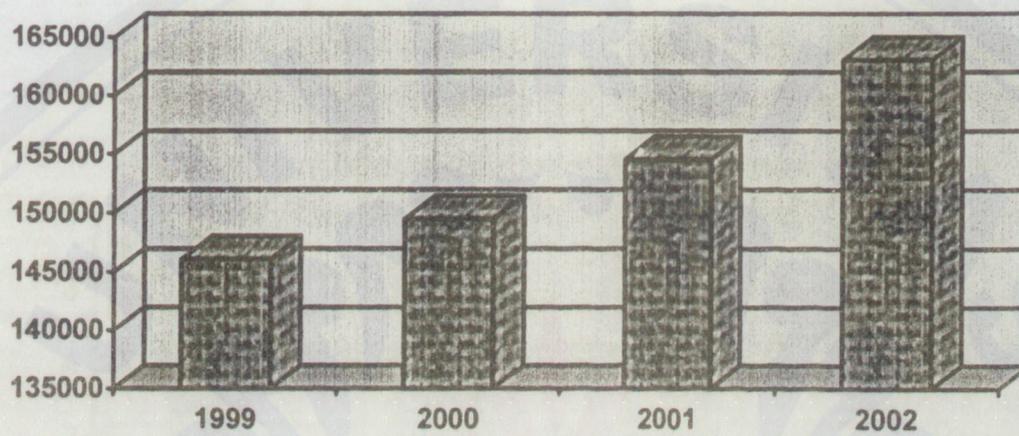
Kontribusi sektor transportasi dan komunikasi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Jember mengalami peningkatan dimana pada tahun 1999 memberikan sumbangan kontribusi sebesar 6,84% dan terus mengalami peningkatan menjadi

6,85% pada tahun 2002. Pada tahun 2000 dan 2001 sektor ini mengalami sedikit penurunan.

Untuk lebih jelas melihat distribusi transportasi dan telekomunikasi tahun 1999 – 2002 dapat dilihat pada grafik nilai dan pertumbuhan sektor transportasi dibawah ini :

Garfik 1.1

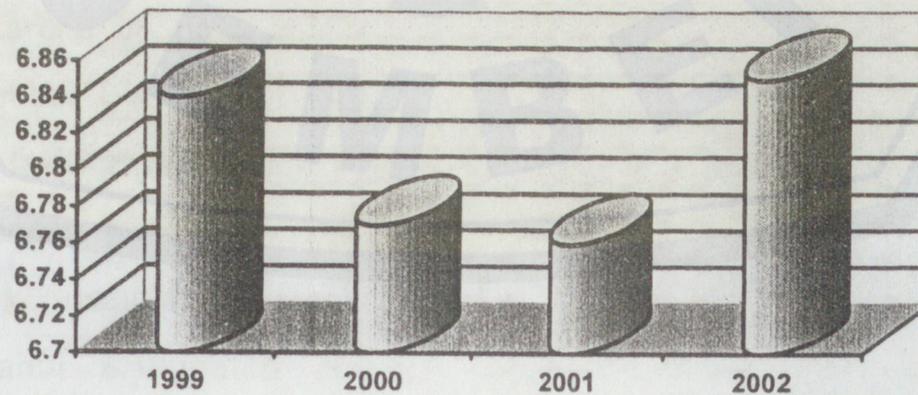
**Grafik Nilai PDRB sektor Transportasi dan Komunikasi
Tahun 1999 – 2002**



Untuk melihat pertumbuhan sektor Transportasi dan Komunikasi dapat dilihat pada grafik Distribusi sektor Transportasi dan Komunikasi terhadap nilai PDRB di Kabupaten Jember:

Grafik 1.2

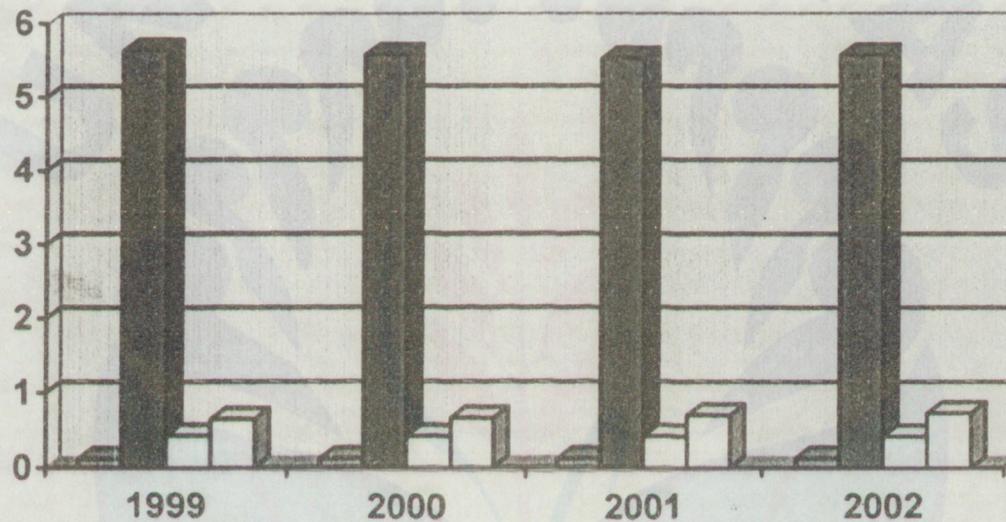
**Grafik Pertumbuhan sektor Transportasi dan Komunikasi
Tahun 1999 – 2002**



Kontribusi terbesar dalam sumbangan terhadap PDRB didalam subsektor transportasi diberikan oleh Jasa Angkutan Jalan Raya yaitu sebesar 5,63% pada tahun 1999 dan sedikit mengalami penurunan menjadi 5,57% pada tahun 2002 (lampiran 2). Jasa Angkutan lainnya dan komunikasi masing-masing hanya memberi kontribusi kurang dari satu persen terhadap PDRB kabupaten Jember seperti terlihat pada tabel 1.2 dan grafik 1.3 dibawah ini:

Grafik 1.3

Grafik Distribusi Persentase PDRB Subsektor Transportasi dan Komunikasi Berdasarkan Harga Konstan '93 Tahun 1999 - 2002



Kabupaten Jember memiliki potensi keunggulan komperatif dan kompetitif dalam berbagai bidang dan sektor, kiprah kegiatan ekonomi akan semakin pesat jika ditunjang oleh tersedianya fasilitas sarana transportasi, baik darat maupun udara. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember merupakan kebutuhan yang tak dapat ditunda lagi. Melalui pembangunan fasilitas lapangan terbang perintis diharapkan bagi investasi, ekspor dan impor dengan segala multiplier efeknya akan dapat berlangsung. Pada gilirannya perkembangan ekonomi Kabupaten Jember akan dapat ditingkatkan. Seperti diketahui Kabupaten Jember dengan luas wilayah 2.537,64 km² berpenduduk hampir mencapai 2,3 juta jiwa tersebar di 32 wilayah kecamatan dengan 350 desa dan kelurahan, memiliki potensi ekonomi yaitu hasil-hasil sektor

pertanian dan perkebunan baik perkebunan milik pemerintah maupun swasta dan rakyat yang sangat melimpah, seperti kopi, coklat, tembakau. Komoditas ini merupakan sumber devisa yang amat penting. Di sektor pariwisata Jember kaya dengan obyek wisata alam dan wisata budaya.

Keberadaan Universitas Jember dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Jember merupakan faktor pendorong utama pula perlunya fasilitas transportasi udara dimasa mendatang. Fasilitas transportasi udara bagi lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk memperlancar proses detase tenaga intelektual bagi pengembangan perguruan tinggi

Keputusan DPRD Kabupaten Jember No 1 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2001 tentang persetujuan pembangunan bandar udara di Kabupaten Jember, yang ditopang oleh PTPN XII untuk pembangunan lapangan terbang perintis merupakan bentuk "*Political Will*" yang tepat.

Lokasi pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember tersebut yang terletak di Desa Wirowongso kecamatan Ajung 20 km arah tenggara dari kota Jember. Lapangan terbang ini merupakan lapangan terbang perintis yang bersifat penyangga terhadap dua bandara internasional yaitu bandara Juanda di Surabaya dan bandara Ngurah Ray di Bali.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember terhadap pembangunan ekonomi daerah dimasa mendatang?
2. Sektor-sektor apakah yang diharapkan mempunyai potensi dimasa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember?
3. Prioritas kebijakan apakah yang harus dilakukan pemerintah daerah dimasa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

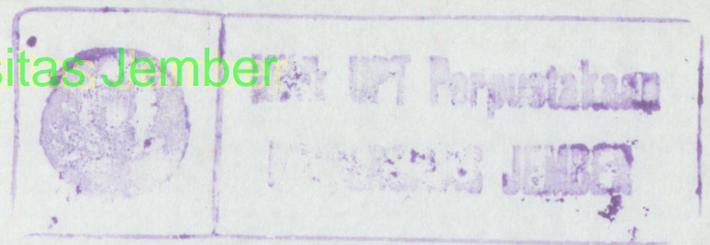
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dampak pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember terhadap pembangunan ekonomi daerah dimasa mendatang.
2. Untuk mengetahui Sektor-sektor yang diharapkan mempunyai potensi dimasa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui prioritas kebijakan Pemerintah daerah dimasa mendatang dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Sumbangan informasi bagi pembuat kebijakan dan pengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.
2. Landasan untuk menemukan kebijakan pembangunan yang sesuai sehingga dapat merealisasikan pembangunan lapangan terbang di Kabupaten Jember.
3. Referensi bagi peneliti lain yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pembangunan lapangan terbang perintis dengan tempat maupun metode penelitian yang berbeda.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan hasil penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan pada tanggal 14-20 April 1986 yang dimuat dalam *European Journal Of Operation Research* No. 47, Tahun 1990 dan diterjemahkan oleh Iwan Jaya Aziz tentang Studi Pasca Evaluasi Proyek Jalan Lintas-Sumatra (JLS) dengan Pendekatan *Analytic Hierarchy Process* dalam Kerangka Biaya dan Manfaat. Jalan Lintas Sumatra (JLS) akan membentang dari ujung selatan ke ujung utara pulau Sumatra untuk memudahkan arus barang maupun penumpang ke atau dari daerah pulau – pulau tersebut serta antara pulau Sumatra dan pulau Jawa yang sudah berkembang. studi pasca evaluasi, yang merupakan dasar penelitian ini, mencakup empat provinsi dibagian selatan pulau Sumatra yang dilalui JLS; Lampung, Sumatra Selatan dan Jambi.

Tujuan penelitian ini menggunakan aplikasi *Analytic Hierarchy Process* (AHP) adalah untuk menganalisa dampak menyeluruh sebuah jalan raya yaitu Jalan Lintas Sumatra terutama yang dirasakan oleh orang-orang yang berdiam di daerah yang dilalui oleh JLS menurut persepsi masyarakat setempat bukan persepsi peneliti atau beberapa pihak lain. Selain mempelajari persepsi masyarakat setempat mengenai dampak JLS juga mencari persepsi mereka mengenai pembangunan yang akan datang.

Kesimpulan yang diperoleh adalah (1). Dampak positif JLS yang dirasakan masyarakat setempat adalah lebih ditingkat nasional daripada regional (dengan bobot 0,750 Lampung, 0,830 Sum-Sel dan Bengkulu, 0,877 Jambi), yaitu mempermudah angkutan hasil perkebunan yang diperuntukan bagi pasar Internasional (ekspor) guna memperoleh pendapatan devisa. (2). Dampak negatif JLS yang dirasakan masyarakat setempat adalah lebih kuat ditingkat regional (dengan bobot 0,830 Lampung dan Sum-Sel, 0,670 Jambi, 0,752 Bengkulu) yaitu biaya sosial sebagai kemungkinan dampak negatif tertinggi karena ditandai dengan perubahan gaya hidup dan goyahnya nilai sosial (biaya modernisasi).

Linton (193 :91) Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu

Shadily (1983:47) Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.

Iver (1955:5) Masyarakat sebagai satu sistem dari pada cara kerja dan produser, dari pada otoritas dan saling bantu membantu yang meliputi kelompok-kelompok atau golongan-golongan dan pembagia-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan . Sistem yang kompleks yang selalu berubah, atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamai masyarakat.

Dari uraian tentang pengertian persepsi dan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat merupakan proses beberapa individu dalam mengadakan kontak secara psikologis dengan dunia objek materi dan orang tertentu (proses pengamatan atau pandangan), berdasarkan pengertiannya terhadap objek atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu pula persepsi seseorang dapat berbeda dengan orang lain.

Hal yang membedakan persepsi seseorang, artinya membedakan sikap pandang dan perilaku seseorang terhadap objek tertentu. Dalam kaitanya dengan penelitian ini maka persepsi adalah bagaimana orang atau masyarakat memahami pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember (Zainuddin, 1996:16).

Disadari bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok dan golongan antara lain adalah kelompok/golongan akademisi, pengusaha, pejabat pemerintah daerah, wakil rakyat/DPRD, pengguna jasa atau *user*, teknokrat dan *Non Government Organization* (NGO). Disadari pula bahwa tidak semua kelompok/golongan mempunyai kaitan dengan efektivitas penerapan kebijaksanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.

2.2.2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan daerah (*Regional Development Planning*) dimaksudkan agar daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Manfaat perencanaan pembangunan regional adalah untuk pemerataan pembangunan atau perluasan dari pusat ke daerah (*spread effects*). Bila perencanaan pembangunan regional berkembang atas dasar kekuatan sendiri, maka kenaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tidak terlalu tergantung pada pusat, tetapi cukup didorong dari daerah yang bersangkutan.

Perencanaan dalam pembangunan daerah harus menetapkan sasaran serta prioritas untuk mencapai yang ditentukan dalam rencana. Sasaran global dan sektoral satu dengan yang lainnya harus serasi dalam rangka mencapai laju pertumbuhan yang dibutuhkan dalam perekonomian. Hal ini membutuhkan penentuan prioritas atas dasar kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perekonomian dengan memperhatikan sumber bahan baku, modal dan sumber daya manusia yang tersedia (Sanusi, 2000)

Pembangunan ekonomi regional adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan wilayah tersebut. Adapun masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sumber daya fisik dan sumber daya keuangan daerah (Arsyad, 1999:108).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bias dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan

untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber swasta secara bertanggung jawab.

Tujuan pembangunan regional merupakan suatu kehendak masyarakat untuk mencapai keadaan tertentu atau menghindari terjadinya keadaan tertentu dimasa mendatang. Terbatasnya kemampuan suatu daerah untuk membangun menyebabkan daerah tersebut tidak dapat mengantasi semua masalah yang ada, seperti masalah sosial, ekonomi dan politik yang timbul akibat adanya pembangunan daerah yang tidak seimbang. Dengan demikian perlu dibuat skala prioritas dari tujuan pembangunan daerah untuk menentukan sampai dimana tujuan tersebut diciptakan dimasa mendatang (Sukirno, 1985:68)

2.2.3 Transportasi Sebagai Penunjang Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

H Abbas salim (1993:6) memberikan pengertian transportasi sebagai pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat angkut dan mengangkut penumpang dari suatu tempat ketempat yang lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu: pemindahan/pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang/komoditi dan penumpang.

H. M. N. Nasution (1996:11) transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. dalam hal ini ada tiga hal yaitu (a) ada muatan yang diangkut, (b) tersedia kendaran sebagai sarana angkutan, (c) ada jalanan yang dapat dilalui.

Fidel (1997:2) Transportasi adalah usaha pemindahan atau pergerakan sesuatu (orang atau barang) dari lokasi asal ke lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dengan menggunakan alat tertentu.

Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan pengangkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi menyebabkan nilai suatu barang/komoditi lebih tinggi ditempat tujuan daripada ditempat asal. Nilai yang diberikan oleh transportasi berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*) (Nasution, 1996:12).

Peranan transportasi dalam ekonomi adalah mempermudah dan mempercepat tersedianya faktor produksi, distribusi dan pertukaran kelebihan. Sedangkan tujuan transportasi adalah memberikan kemudahan (aksesibilitas) dalam segala aktivitas masyarakat, mudahnya faktor produksi didapatkan, mudahnya informasi menyebar, mudahnya penduduk bergerak (mobilitas tinggi).

Dari segi ekonomi, transportasi memberikan jasa kepada masyarakat yaitu jasa transportasi. Jasa transportasi merupakan hasil (*output*) dan faktor masukan (*input*). Sesuai dengan permintaan transportasi merupakan turunan permintaan dari teori permintaan akan barang dan jasa, teori tentang pilihan konsumen (*consumer choice*) dan teori perilaku konsumen (*consumer behavior*). Transportasi dikatakan sebagai *derived demand* karena kebutuhan akan jasa transportasi adalah kebutuhan yang diturunkan dari kebutuhan manusia akan tujuan akhir. Kebutuhan akan jasa transportasi bertambah dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan berkurang jika terjadi kelesuan ekonomi.

Kebutuhan akan jasa transportasi berawal dari interaksi diantara aktivitas sosial dan ekonomi dalam suatu ruang atau tempat. Permintaan jasa akan transportasi merupakan dasar yang penting dalam melakukan perencanaan pembangunan transportasi. Variabel – variabel yang menentukan permintaan jasa transportasi ada dua yaitu sisi pemakai jasa dan sisi sistem transportasi yang akan dikonsumsi.

Secara geografis, jenis-jenis transportasi baik sarananya maupun prasarananya adalah sebagai berikut: (1). Angkutan kereta api (*railroad/highway*) (2). Angkutan motor dan jalanraya (*motor-road/highway*) (3). Angkutan laut (*water/sea transportation*) (4). Angkutan Udara (*air transportation*) (5). Angkutan pipa (*pipeline*).

Jenis transportasi angkutan udara memiliki keunggulan tersendiri dari segi kecepatan dan dapat menjangkau tempat lain yang tidak dapat dijangkau oleh moda transportasi lain dalam ruang lingkup pengangkutan udara sebagai mana angkutan lainnya, angkutan udara memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat. Angkutan melalui udara dengan pesawat terbang dapat dapat memungkinkan adanya pemindahan secara sistematis bagi orang maupun barang

dari tempat asal ke tempat tujuan dan hal ini merupakan suatu hal yang essential di dalam sistem distribusi maupun dapat memberikan arti bagi terciptanya manfaat tempat dan waktu (*time utility and place utility*) dimana memungkinkan pemindahan barang-barang dari satu tempat dimana barang tersebut kurang diperlukan ke tempat lain yang memerlukan serta memungkinkan mengadakan barang-barang tempat pada waktu diperlukan tempat tersebut (Kansil, 2001:12)

2.2.4 Metode *Analytic Hierarchy Process* Salah Satu Alternatif dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, setiap *policy maker* dalam hal ini pejabat maupun anggota masyarakat sering dihadapkan pada kompleksnya permasalahan yang dihadapi sehingga memunculkan banyak pertimbangan dan alternatif dalam pengambilan keputusan. Permasalahan yang kompleks sulit untuk dipecahkan dengan analisis yang sederhana, apalagi permasalahan yang banyak yang tidak terstruktur. Banyaknya pertimbangan dalam penentuan kebijakan muncul dalam proses pengambilan keputusan dengan berbagai variabel yang diperhitungkan serta kompleksitas yang dihadapi. Sementara itu, alternatif kebijakan yang diambil tidak hanya satu atau dua saja melainkan meliputi sederetan kebijakan, sehingga sulit untuk menentukan prioritasnya bahkan terkadang kebijakan yang diambil bila dikaitkan satu sama lain menjadi kurang konsisten.

Hal ini ditambah lagi dengan kondisi informasi dan data yang masih diragukan keabsahannya. Dan juga karena pengalaman atau beberapa *policy maker* di daerah lebih baik daripada data dan bahkan sangat mewakili kondisi daerah, maka suatu alternatif metode untuk menangkap persepsi tersebut perlu dikembangkan. Dalam konteks inilah metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)* merupakan salah satu alternatif. (Widi, 2002:30)

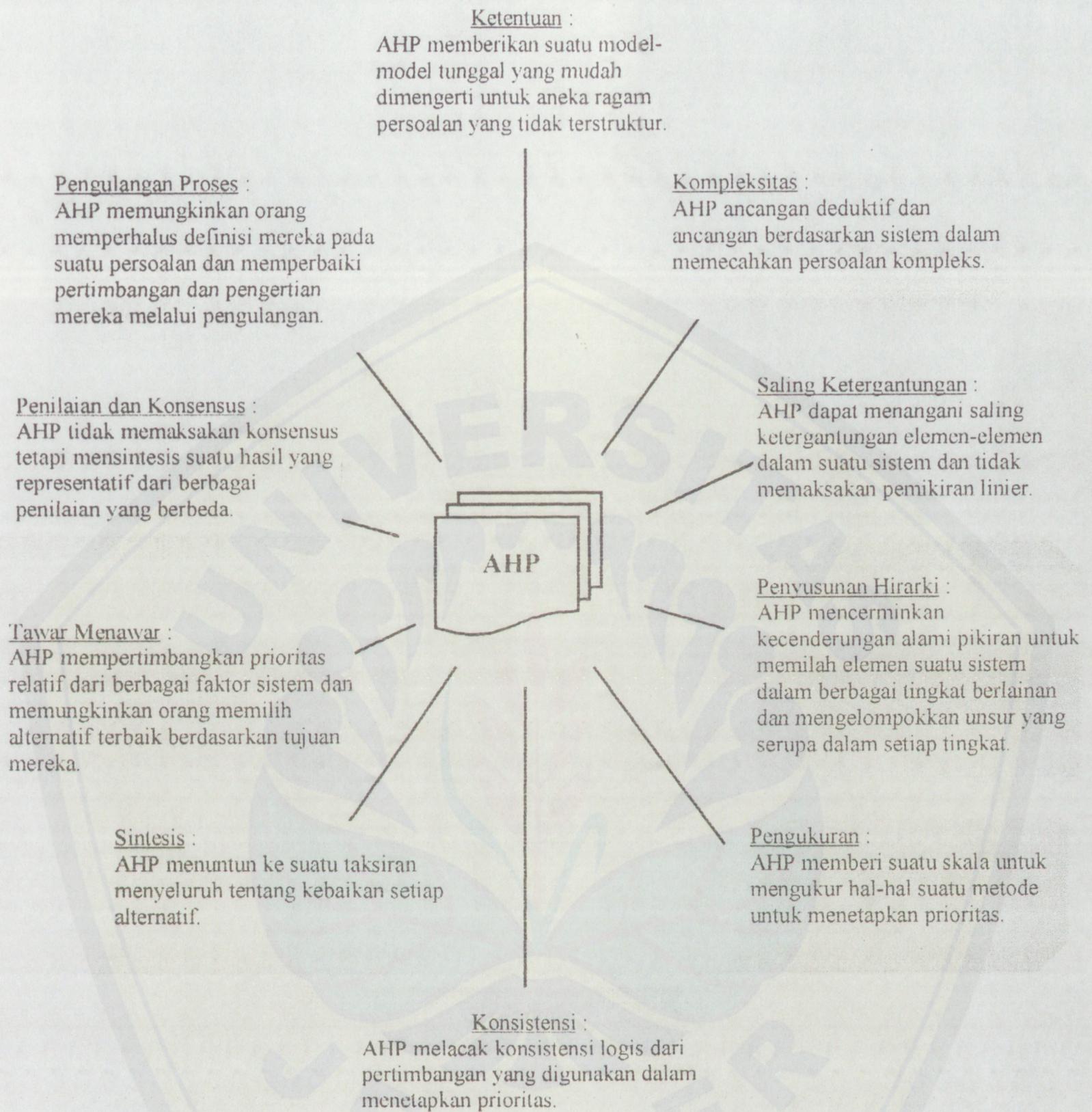
Metode AHP pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Prof. Thomas L. Saaty, seorang Guru Besar pada Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1971 sampai 1975. Dalam bukunya "*An Eigenvalue Allocation model For Prioritization and Planning*" oleh *Energy manajement and*

Policy Center. Metode ini merupakan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan peralatan utamanya yaitu sebuah hirarki. Dasar teori yang digunakan adalah teori pengukuran dan teori hirarki. Sedangkan metodologi yang dipakai berkisar penentuan urutan pentingnya sederetan kriteria dan pilihan kebijakan.

Data utama dari AHP adalah persepsi manusia yang dianggap ahli atau *expert*, artinya orang yang dianggap lebih mengerti benar dengan permasalahan yang dihadapi dalam suatu penelitian. Salah satu kemungkinan pendekatan AHP, khususnya pemakaian di tingkat daerah adalah pengendalian terhadap persepsi seseorang di daerah tersebut, terutama yang paling mengetahui suatu bidang tertentu yang dianalisis. Bidang yang dimaksud sangat terbatas pada kekhususan aparat daerah yang bersangkutan.

Pendekatan AHP bukan hanya besar manfaatnya bagi perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga dapat membantu mengambil keputusan di daerah untuk menentukan prioritas sederetan tujuan, skenario, masalah dan kebijakan. Bahkan suatu kasus konflik politik dan sosio-ekonomi juga dapat diselesaikan secara kompromi dengan menggunakan AHP. Selain itu, AHP mempunyai aplikasi data masalah, analisis sumber, analisis biaya manfaat (*cost benefit*) maupun masalah interdependensi umum. Dengan demikian AHP dianggap sebagai suatu model yang sebaguna dan banyak yang menganggap kontroversial atau *multiobjective – multicriteria – multifactor decisions* (Harker dan Vagas, 1997:1383)

Diluar perspektif daerah, keuntungan lain penggunaan metode AHP oleh Saaty (1991,25) di jelaskan dalam gambar berikut :



Gambar 2.1 : Berbagai Keuntungan Analytic Hierarchy Process

Sumber : Saaty, 1991

2.2.5.1 Prinsip Kerja AHP

Untuk memecahkan permasalahan dengan metode AHP, ada beberapa prinsip dasar yang harus dimengerti yakni *Decomposition*, *Comparative judgment*, *Synthesis of priority* dan *Logical consistency*.

Decomposition, merupakan proses penguraian permasalahan atau elemen menjadi unsure-unsurnya sehingga tidak dapat diuraikan ataupun dijabarkan lagi. Dari proses penguraian tersebut akan didapatkan beberapa level hirarki atas persoalan yang kita hadapi. Ada dua macam hirarki, yaitu hirarki lengkap bila semua elemen pada suatu level memiliki semua elemen yang ada pada level berikutnya, dan bila tidak demikian disebut hirarki tak lengkap.

Comparative Judgment, merupakan proses penilaian kepentingan relative terhadap elemen-elemen yang terdapat dalam suatu level sehubungan dengan level di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena akan ditemukan prioritas dari elemen/variable yang ditentukan. Hasil penilaian akan mudah diikuti bila disajikan dalam matriks a_{ij} berikut ini:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Matriks ini mempunyai sifat resiprokal, yakni:

$$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

Di mana i dan j berturut-turut merujuk pada baris dan kolom.

Sekarang misalkan $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ merupakan himpunan elemen sebanyak n dan $W_1, W_2, W_3, \dots, W_n$ merupakan timbangan (*weight*) atau intensitas masing-masing elemen. AHP menentukan perbandingan antar-dua-elemen (*pairwise comparison*) menurut timbangan atau intensitasnya. Perbandingan antar-dua-elemen tersebut dapat ditunjukkan pada matriks W_i/W_j berikut:

	A_1	A_2	A_3	...	A_n
A_1	W_1/W_1	W_1/W_2	W_1/W_3	...	W_1/W_n
A_2	W_1/W_1	W_1/W_2	W_1/W_3	...	W_1/W_n
A_3	W_1/W_1	W_1/W_2	W_1/W_3	...	W_1/W_n
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots		\vdots
A_n	W_1/W_1	W_1/W_2	W_1/W_3	...	W_1/W_n

Matriks ini menunjukkan tingkat kepentingan setiap A terhadap A lainnya, yang diukur dengan skala ordinal. Untuk mengukur tingkat kepentingan tersebut, AHP mengusulkan skala seperti yang tercantum pada tabel 1, yang dimulai dari sama-sama pentingnya (*equally preferred*) hingga mutlak pentingnya (*extremely preferred*). Penilaian atau judgement bisa dilakukan atas dua pernyataan yaitu: (1) Elemen mana yang lebih (penting, disukai, mungkin terjadi, ...). (2) Berapa kali lebih (penting, disukai, mungkin terjadi, ...)

Tabel 2.1
Skala Preferensi AHP

Skala	Definisi	Keterangan
1	<u>Sama-sama</u> Diharapkan/penting	Kriteria A dan B <u>sama-sama</u> diharapkan / pentingnya
3	<u>Cukup sedikit</u> Diharapkan/penting	Kriteria A <u>cukup sedikit</u> diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
5	<u>Lebih</u> Diharapkan/penting	Kriteria A <u>lebih</u> diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
7	<u>Sangat</u> Diharapkan/penting	Kriteria A <u>Sangat</u> diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
9	<u>Mutlak</u> Diharapkan/penting	Kriteria A <u>Mutlak</u> diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
2,4,6,8	Nilai-nilai antara	Jika ragu-ragu dalam memilih skala, misalkan memilih sangat disukai atau mutlak disukai
Resiprokal	Jika A dibanding B adalah, katakanlah skala 7, maka B dibanding A adalah skala 1/7	Asumsi yang masuk akal

Sumber: Sulistyanti (2000)

Pemilihan skala 1 sampai 9 didasarkan pada penelitian psikologi, pendapat pemakai AHP, perbandingan skala lain, dan kemampuan otak manusia dalam menyuarakan urutan preferensinya (Harker dan Vargas, 1987). Skala yang paling kecil adalah 1 untuk menyatakan bahwa kedua elemen yang dibandingkan sama pentingnya atau sama disukai. Supaya diperoleh skala yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk penilaian perbandingan diperlukan seseorang yang mempunyai pengertian yang menyeluruh mengenai seluruh elemen atau variabel yang ingin dibandingkan.

Synthesis of priority, Setelah diperoleh skala perbandingan berpasangan, selanjutnya, dicari dengan komputer atau secara manual suatu *eigen vector* yang menunjukkan *local priority* pada suatu hirarki. Oleh karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap hirarki, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesis di antara *local priority*. Penentuan urutan setiap tisp elemen berdasarkan prioritas melalui sintesis dinamakan *priority setting*.

Logical Consistency, adalah prinsip rasionalitas AHP. Ada tiga makna yang terkandung dalam konsep konsistensi, yaitu :

1. Objek-objek yang serupa atau sejenis bisa dikelompokkan sesuai dengan relevansinya.
2. Matriks perbandingan antar-dua-elemen bersifat resiprokal, artinya jika A_1 adalah dua kali lebih penting dari A_2 , maka A_2 adalah seteengah kali lebih penting dari A_1 .
3. Hubungan antarelemen bersifat transitif
4. Berdasarkan tiga makna tersebut, maka konsistensi yang dimaksud dalam AHP bukanlah sekedar *transitivity*

2.2.5.2 Prioritas, Eigenvector, dan Konsistensi

Dari setiap matriks *pairwise comparison* akan keluar *eigen vector* yang menunjukkan tingkat prioritas dari elemen atau variabel yang dibandingkan dalam matriks tersebut. Pencarian matriks prioritas (*eigen vector*) dilakukan melalui penghitungan *eigen value*. Proses penentuan *eigen vector* dan *eigen value* dari suatu matriks mensyaratkan suatu matriks yang *reduceable* dan atau non-negatif.

Dengan skala 1-9, maka syarat tersebut dapat dipenuhi karena elemen terkecil adalah 1/9 dan terbesar adalah 9.

Sebenarnya banyak cara untuk menghitung prioritas setiap elemen dari matriks *pairwise comparison*. Cara yang termudah misalnya dengan dengan menjumlahkan angka-angka dalam matriks tersebut menurut baris atau kolom, kemudian bobot setiap elemen ditentukan dengan membandingkan jumlah per baris atau kolom tadi dengan total penjumlahan baris atau kolom. Cara ini dianggap kurang tepat karena hanya mencerminkan jumlah elemen terhadap matriks secara keseluruhan dan tidak memperhatikan pengaruh suatu elemen terhadap matriks lainnya.

Cara yang paling baik dari segi keakuratan (untuk $n = 4$) adalah:

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\frac{w_1}{w_1} \times \frac{w_1}{w_2} \times \frac{w_1}{w_3} \times \frac{w_1}{w_4}} &= a \\ \sqrt[4]{\frac{w_2}{w_1} \times \frac{w_2}{w_2} \times \frac{w_2}{w_3} \times \frac{w_2}{w_4}} &= b \\ \sqrt[4]{\frac{w_3}{w_1} \times \frac{w_3}{w_2} \times \frac{w_3}{w_3} \times \frac{w_3}{w_4}} &= c \\ \sqrt[4]{\frac{w_4}{w_1} \times \frac{w_4}{w_2} \times \frac{w_4}{w_3} \times \frac{w_4}{w_4}} &= d \\ \hline &a + b + c + d \end{aligned}$$

Kemudian normalkan vektor (a, b, c, d) untuk mengetahui posisi relatif masing-masing elemen. Jika hirarki memiliki beberapa vektor prioritas (*local priority*), vektor-vektor tersebut dapat disintesis menjadi *global priority*. Proses sintesis ini dinamakan *priority setting*.

Perhitungan prioritas pada matriks *pairwise comparison* juga harus memperhatikan tingkat konsistensi, karena bagaimanapun juga inkonsistensi yang terlalu besar tidak dapat diterima dan bisa menjurus pada pengambilan keputusan yang salah. Metode AHP akan mengukur konsistensi penilaian yang dimulai dengan menghitung *consistency index* (CI), yakni

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

Dimana n adalah jumlah elemen yang hendak dibandingkan, dan λ_{\max} adalah *eigen value*, kemudian dihitung *consistency ratio* (CR), yaitu *consistency index* dibagi dengan *random Index* (RI), yang disajikan pada tabel 2. Nilai CR diusahakan berkisar tidak lebih dari 10%.

Tabel 2.2
Indeks Random

Orde Matriks	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Random	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Indeks random adalah indeks konsistensi (CI) matriks resipokal yang dibentuk secara random. Indeks ini (tabel) diperoleh setelah melalui eksperimen terhadap 100 sampel dengan matriks orde 1 hingga 15, dengan hipotesis bahwa indeks akan meningkat searah dengan besarnya orde matriks.

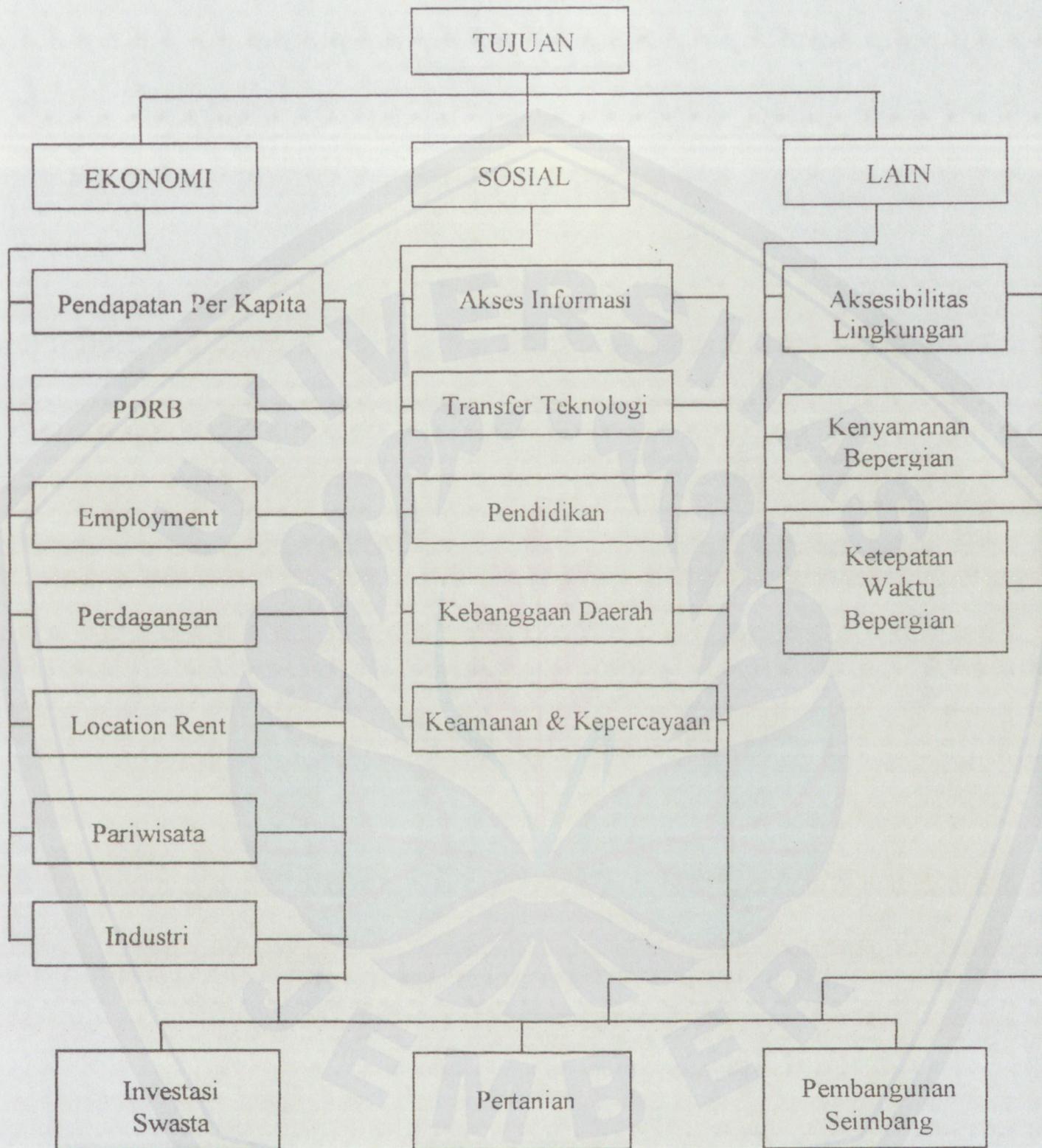
2.2.5.3 Hirarki

Penerapan model AHP melalui dua tahap kegiatan, yaitu: penyusunan hirarki dan evaluasi hirarki. Proses penyusunan hirarki yang dikenal dengan istilah *decomposisi*, merupakan proses iterasi, dimana konsep, pertanyaan dan jawabannya, menentukan elemen suatu hirarki.

Ada dua macam hirarki menurut Saaty (1991:30), yaitu hirarki structural dan hirarki fungsional. Hirarki structural adalah system kompleks yang disusun kadalam komponen – komponen pokoknya dalam urutan menurun menurut sifat stryktural mereka. Hirarki structural sangat erat kaitannya dengan cara otak kita menganalisis hal yang kompleks, yaitu dengan menguraikan obyek yang ditangkap oleh indera menjadi sejumlah gagasan, sub gagasan dan gagasan yang lebih kecil. Sebaliknya, hirarki fungsional menguraikan system yang kompleks menjadi elemen – elemen pokoknya menurut hubungan esensial mereka. Hirarki fungsional sangat membantu untuk membawa system kearah tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari deskripsi gambaran umum dan kondisi perencanaan pembangunan lapangan terbang di Kabupaten Jember, hiraki permasalahan disusun sebagai berikut:

**HIRARKI
PEMBANGUNAN LAPANGAN TERBANG PERINTIS
DI KABUPATEN JEMBER**



Gambar 2.2: Hiararki Pembangunan Lapangan Terbang Perintis

KETERANGAN HIRARKI

Hirarki Level 1

Bidang-bidang yang berpengaruh terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember :

1. EKONOMI
2. SOSIAL
3. LAIN-LAIN

Hirarki Level 2

Faktor-Faktor yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Jember terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember :

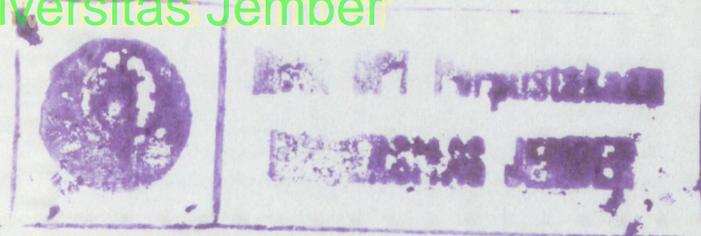
1. Pendapatan Per Kapita : Meningkatkan Pendapatan Per Kapita masyarakat di Kabupaten Jember
2. PDRB : Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Jember
3. *Employment* : Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember
4. Perdagangan : Memperlancar perdagangan dalam dan luar negeri di Kabupaten Jember
5. *Location Rent* : Meningkatkan nilai intereregional karena faktor lokasi di Kabupaten Jember
6. Pariwisata : Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Jember
7. Industri : Pendirian Industri – Industri baru di Kabupaten Jember
8. Akses Informasi : Mempermudah dan memperlancar akses informasi / komunikasi di Kabupaten Jember
9. Transfer Teknologi : Proses transfer teknologi sebagai penunjang produktifitas di Kabupaten Jember

10. Pendidikan : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas Pendidikan yang ada di Kabupaten Jember
11. Kebanggaan daerah : Menjadi kebanggaan daerah Kabupaten Jember
12. Keamanan dan kepercayaan : Menjaga keamanan dan kepercayaan Kabupaten Jember
13. Aksesibilitas Lingkungan : Meningkatkan aksesibilitas lingkungan di Kabupaten Jember
14. Kenyaman berpergian : Rasa nyaman dalam berpergian
15. Ketepatan waktu berpergian : Ketepatan / kecepatan waktu yang ditempuh dalam perjalanan berpergian

Hirarki Level 3

Alternatif Kebijakan yang dianggap penting terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember:

1. Investasi swasta : Kebijakan yang mendorong penanaman investasi swasta di Kabupaten Jember
2. Pertanian : Kebijakan yang mendorong aktivitas pertanian, termasuk Agroindustri di Kabupaten Jember
3. Pembangunan Seimbang : Kebijakan pada aktivitas sektoral, termasuk industri, pertambangan, perdagangan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini bersifat *descriptive research*, yaitu membuat pencanderaan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 2003;20).

Metodologi AHP merupakan penelitian deskriptif yang dikemukakan oleh Saaty (1996;20) bahwa:

"The AHP is a descriptive theory. Therefore, it is not an automatic set up for accommodating any normative approach such as utility maximization. It needs to be interpreted and adapted for that purpose."

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah persepsi orang atau sekelompok orang yang ahli atau *expert* dan dianggap lebih mengerti juga memahami mengenai perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.

3.1.3 Populasi

Populasi dalam Penelitian ini adalah pembuat keputusan atau *decision maker* yaitu teknokrat, pemerintah, pengusaha, pengguna jasa (*user*) dan orang yang dianggap ahli atau *expert* serta mengetahui lebih banyak permasalahan tentang perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember.

3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. **Data primer**, diperoleh dari riset dilapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat langsung dan ahli atau *expert*

dalam bidang perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember. Kuesioner tersebut di sebarakan kepada beberapa pihak yaitu;

- 1) Pakar atau Akademisi dari beberapa Universitas di Kabupaten Jember yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- 2) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dalam hal ini difokuskan pada :
 - Pejabat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, dalam hal ini Kepala/wakil Bappeda beserta staf.
 - Pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dalam hal ini Kepala/wakil Dishub beserta staf.
- 3) DPRD Kabupaten Jember, dalam hal ini Ketua Dewan, Sekretaris Dewan serta ketua komisi D dan sekretaris komisi D
- 4) *Non Government Organization* (NGO) atau LSM
- 5) Pengguna Jasa (*User*)

2. **Data Sekunder**, yang diperoleh melalui studi literature dari koran, jurnal, makalah, buku yang mendukung penelitian dan *surfing* melalui internet. sehingga diharapkan dengan landasan teori yang kuat akan diperoleh kesimpulan yang berbobot ilmiah.

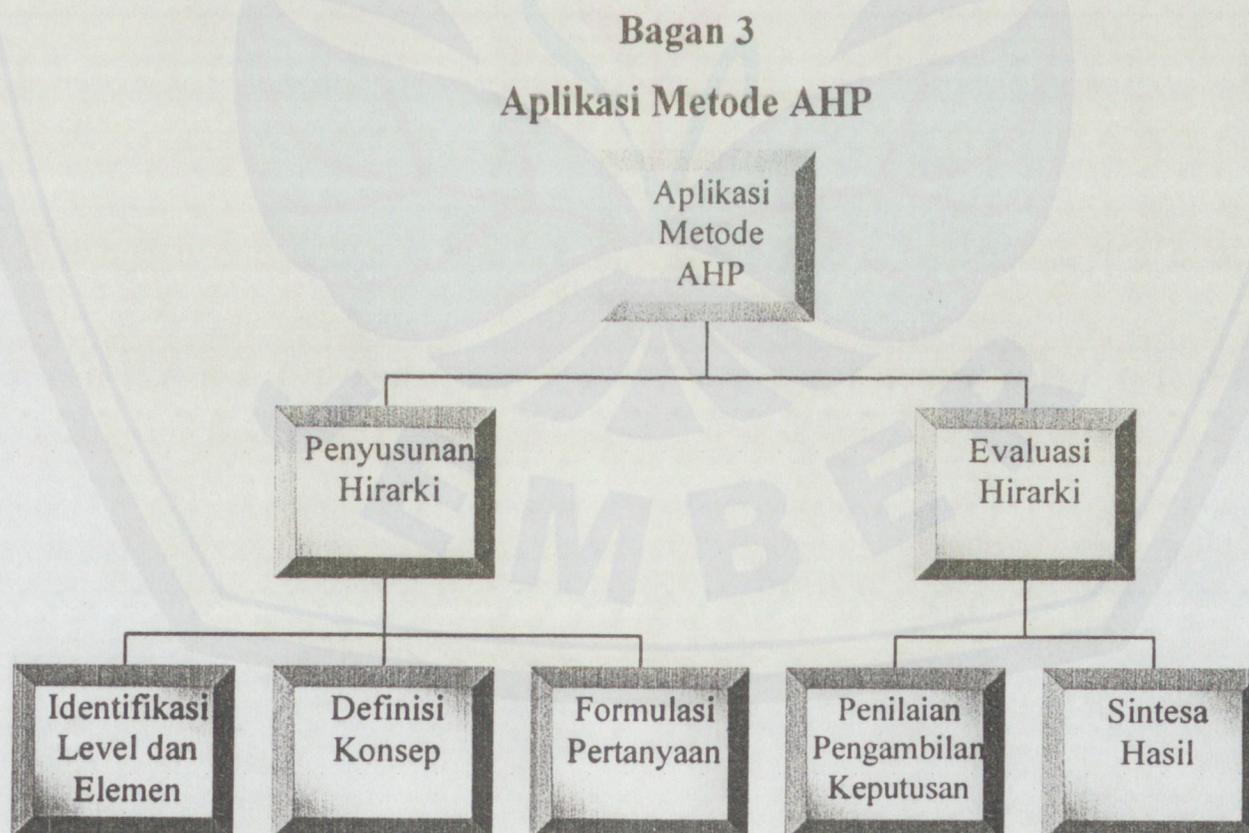
3.3 Metode Analisis Data

Aplikasi model AHP dapat dibagi dalam dua tahapan, yaitu penyusunan hirarki dan evaluasi hirarki. Penyusunan hirarki yang biasa dikenal sebagai dekomposisi mencakup tiga proses yang saling berhubungan dan berurutan, yaitu: identifikasi level dan elemen, definisi konsep, dan formulasi pertanyaan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi level-level dan elemen-elemen dalam suatu level, kemudian setiap elemen tersebut diidentifikasi dan dipakai dalam formulasi pertanyaan.

Pada tahapan evaluasi hirarki ada dua hal yang dilakukan, yaitu penilaian dan sintesa hasil. Penilaian berarti pengambilan keputusan melalui penerjemahan semua informasi yang tersedia dan persepsinya untuk membandingkan sepasang elemen. Persepsi atau penilaian tersebut dinyatakan dalam skala 1 sampai 9 dan hasil ini nantinya akan membentuk sebuah matriks *pairwise comparison*. Setelah matriks terisi semua maka prioritas dari setiap elemen dalam satu level dicari dengan cara mencari *eigenvector*-nya, proses ini disebut *local priority*. langkah berikutnya adalah melakukan sintesa prioritas elemen pada level di atasnya. Matriks ini akan menghasilkan suatu *global priority* yang menyatakan prioritas masing-masing elemen pada level terakhir dengan syarat sudah memperhatikan pengaruh elemen pada level sebelumnya.

Model AHP tidak mensyaratkan konsistensi yang ketat, tetapi pada bagian akhir tetap diperiksa kembali apakah inkonsistensi pada *local priority*, maka *global priority* masih dapat dijamin konsistensi atau inkonsistensi minimal. Akan tetapi, diusahakan agar *global priority*-nya mempunyai inkonsistensi yang rendah.

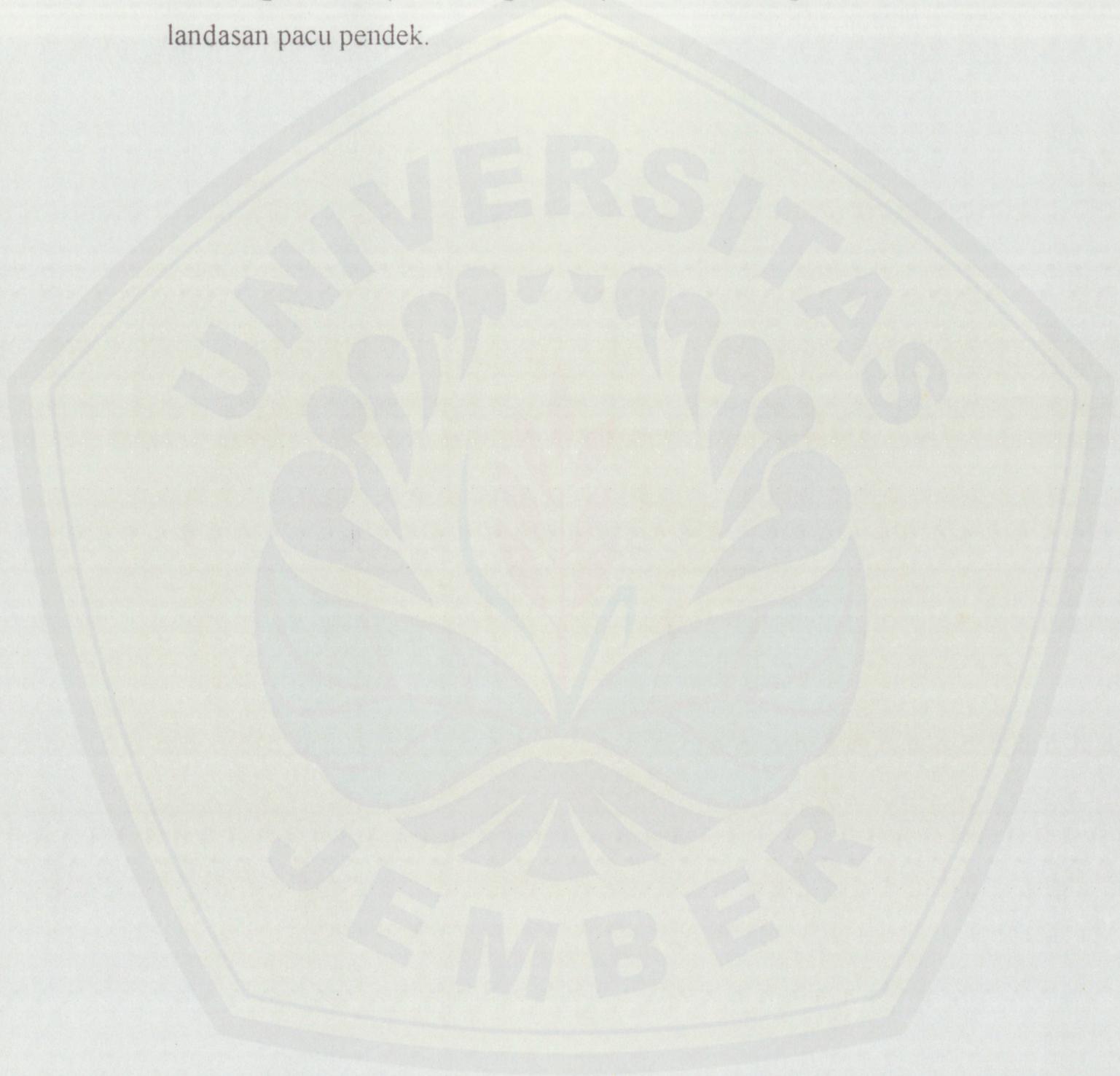
Jika digambarkan dalam suatu bagan metode aplikasi *Analytic Hierarchy Process* (AHP) adalah sebagai berikut:

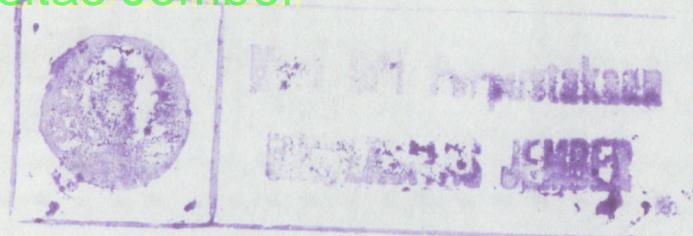


3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Untuk memperoleh persepsi yang sama maka akan diberikan definisi variable operasional sebagai berikut:

- Lapangan terbang perintis adalah prasarana transportasi udara untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan pesawat terbang, dimana memiliki landasan pacu pendek.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Jember memiliki luas sekitar 3.293.34 Km² terletak pada posisi 6°27'9" sampai dengan 7°14'33" bujur Timur sampai dengan 7°59'33" sampai dengan 8°33'56" Lintang Selatan. Berbentuk dataran Ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan serta Samudera Indonesia sepanjang batas selatan dengan pulau Nusa Barung yang merupakan satu – satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Batas administratif kabupaten Jember adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebagian kecil Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Jember secara administratif terbagi menjadi 31 kecamatan dan 222 desa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jember merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah rata-rata 83 meter diatas permukaan laut dan merupakan dataran rendah yang cukup subur dan cocok untuk mengembangkan komoditi pertanian dan perkebunan sehingga Kabupaten Jember dikenal sebagai penghasil devisa negara sektor perkebunan terbesar di Jawa Timur dengan komoditi andalan seperti kakao, karet, kopi, dan tembakau. Kabupaten Jember terbagi dalam beberapa kawasan yakni perkampungan, sawah, tegalan, kebun, campuran, perkebunan rakyat/swasta, tembakau, danau, tanah kritis dan hutan (BPS Kabupaten Jember, 1999)

4.1.2 Deskripsi Pembangunan Lapangan Terbang Perintis

Kabupaten Jember merupakan daerah yang strategis karena dikelilingi oleh daerah tapal kuda yang potensial meliputi Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat dan

mengembangkan potensi sumberdaya serta mengantisipasi kebutuhan jasa transportasi udara dimasa mendatang, Pemerintah Kabupaten Jember berencana membangun lapangan terbang perintis.

Berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2001 tentang persetujuan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember serta mengenai penyerahan lahan oleh PTPN XII. persetujuan juga diperoleh dari tingkat propinsi (Gubernur Jawa Timur) yaitu prosedur pembangunan lapangan terbang yang telah ditaati serta menyangkut TaTrawil (Tatanan Transportasi Wilayah) atau Tata Ruang Wilayah Jawa Timur.

Rencana pembangunan lapangan terbang perintis tersebut selain untuk penerbangan komersil untuk rute Jember - Surabaya dan Jember - Denpasar juga direncanakan sebagai bandara udara embarkasi untuk pemberangkatan jamaah Haji. Rencana penerbangan atau pendaratan yang pertama adalah tanggal 1 Januari 2005 bertepatan dengan HUT Kabupaten Jember. Jenis kapal terbang yang beroperasi adalah pesawat komersial yang hanya memuat 45 – 50 penumpang.

Lokasi Pembangunan Lapangan Terbang Perintis

Pemerintah daerah kabupaten jember mengadakan kemitraan atau KSU PTP XII, dimana PTP XII menyediakan lahan yang sudah tidak produktif seluas 120 hektar. Lahan tersebut terletak di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung 20 km arah tenggara kota Jember. Lahan tersebut sangat layak karena fasilitas sarana jalan menuju lokasi relatif mendukung.

Teknis Lapangan Terbang Perintis

1. Landasan

Dengan adanya persediaan tanah yang cukup maka, dapat dibuat standart landasan sebagai berikut :

- a. Runway designation/Azimuth : 09 – 27
- b. Panjang x Lebar : 1000 meter x 30 meter
- c. Runway Surface : Asphalt penetrasi sebagian ditumbuhi rumput dengan pemasangan batu

- d. Strength : Landasan dapat didarati pesawat gelatik, Pilatur, dan pesawat sejenis.
- 2. Overrun**
- a. Panjang dan lebar : Panjang dan lebar overrun, dapat dibangun dengan demention length dan width 60 m x 30 m
- b. Surface : Tanah dan rumput
- c. Arah Overrun : Timur – Barat atau Tenggara – Barat laut
- 3. Shoulders**
- a. Panjang dan Lebar : Panjang dan lebar shoulders, dapat dibangun dengan demention length width 1.120 m : 19 m sisi satu dan 15 m sisi yang lain.
- b. Surface berupa : Tanah dan rumput.

4. Fasilitas Pendukung

a. Fasilitas Navigasi dan Telekomunikasi

Untuk keseluruhan Navigasi perlu adanya fasilitas navigasi. Standart peralatan Navigasi udara, berdasarkan Non Directional Bencon (N.D.B) daya jangkau dan frekuensi diseduaiakan dengan fasilitas Navigasi dan telekominikasi yang ada disekitar lapangan terbang.

Untuk hubungan langsung antara satu lapangan terbang dengan lapangan terbang yang lain, serta hubungan lapangan terbang dengan pesawat udara yang bersangkutan diperlukan sarana komunikasi penerbangan

Single Side Bound merupakan standart peralatan komunikasi yang mempunyai nilai ekonomis dan prktis. Selain itu untuk keperluan komunikasi antara pesawat terbang dengan lapangan terbang standart peralatan pada tower UHF/Becker dengan daya jangkau yang telah ditentukan.

b. Rambu-rambu

Kantong angin (wind Sack) merupakan petunjuk arah angin di lokasi lapangan terbang tersebut, sangat diperlukan sebagai rambu penerbangan. Rambu rambu lain sesuai dengan persyaratan ICAD, sangat diperlukan sebagai alat bantu bagi pesawat yang mendarat dan tinggal landas.

c. Pertolongan Kecelakaan Pesawat Terbang

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat terbang dan kebakaran maka diperlukan fasilitas penolong kecelakaan pesawat terbang dan pemadam kebakaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

d. Personil

Untuk tugas teknis operasional penerbangan diperlukan tenaga terdidik dan trampil. Bila frekuensi penerbangan masih belum padat, maka tugas tugas tersebut masih bisa dirangkap misalnya :

- tugas teknis lapangan terbang meliputi : tugas landasan, terminal, bangunan operasional;
- tugas keselamatan penerbangan yang meliputi tugas pelayanan tower, komunikasi, PKP, dan keamanan;
- tugas teknis komunikasi, listrik dan navigasi;
- tugas administrasi yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, material dan lainnya.

Konsumen (Pengguna) Produk Jasa Pesawat Terbang.

Pengguna jasa tersebut adalah segmen pasar yang bergerak dalam bidang bisnis, baik pelaku bisnis (pengusaha) ataupun produk bisnis keluar dan transit di kota Jember. Disamping itu keberadaan Universitas Jember potensial menjadi konsumen, karena hubungan dengan luar negeri maupun dosen terbang untuk beberapa fakultas yang sedang berkembang seperti Fakultas kedokteran, teknik dan sebagainya. Lokasi Jember relatif dekat dengan Bali juga diharapkan menjadi potensial sebagai alternatif penerbangan, karena selain tujuan utama adalah Bali, penerbangan melalui Jember menjadi sajian khas wisata darat melalui Jember sendiri dan Banyuwangi. Selain berbagai sarana transportasi alternatif bagi

manusia, beberapa jenis komoditi andalan Jember juga dapat diangkut. Sedangkan Jasa terkait adalah kegiatan yang berkaitan secara tidak langsung dari jasa angkutan udara, seperti perhotelan, rumah makan, pelayanan angkutan kota khusus ataupun jasa pergudangan disekitar lokasi lapangan terbang perintis tersebut.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Pengumpulan Data

Aplikasi metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) ini sedikit berbeda dengan metode penelitian survey pada umumnya. Proses adopsi pendapat responden dalam AHP tidak mensyaratkan jumlah minimum tertentu dari responden untuk mewakili suatu persepsi terhadap permasalahan, tetapi AHP hanya mensyaratkan responden-responden yang berkompeten serta mewakili pengetahuan yang konperhensif terhadap permasalahan yang diangkat dan secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan (Widi, 2005:51).

Berdasarkan identifikasi masalah dari responden yang terkait dengan masalah perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember, maka input data yang diambil berasal dari beberapa pihak, yaitu (1) Akademisi atau pakar dari beberapa Universitas di Kabupaten Jember dalam hal ini diwakili oleh Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmi Sosial dan Politik, (2) Pemerintah Daerah kabupaten Jember dalam hal ini diwakili oleh badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Dinas Perhubungan, (3) DPRD Kabupaten Jember dalam hal ini diwakili oleh Komosi D, (4) *Non Government Organization* atau LSM, (5) Pengguna Jasa (*User*) transportasi udara.

Berbagai keterbatasan dan kendala serta sulitnya mencari responden yang memiliki standar kualifikasi dalam masalah ini, menyebabkan kuesioner yang berhasil disebar hanya 12 buah. Ahli atau pakar yang menjadi responden dalam penelitian ini dari keempat kelompok, yaitu akademisi dari Universitas Jember 3 responden, birokrat dalam hal ini pejabat Pemda Kabupaten Jember 4 orang, DPRD Kabupaten Jember 2 responden, dan NGO 3 responden.

4.2.2 Hasil Perhitungan Data

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan landasan teori yang digunakan sebagai alat untuk menjelaskan fenomena-fenomena empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember, maka dapat disajikan pemecahan kompleksitas permasalahan dalam bentuk hirarki dampak pembangunan lapangan terbang perintis di kabupaten Jember. Hirarki yang ada ditanggapi oleh para responden sehingga menghasilkan data yang kualitatif yang dikuantisir. Data yang diperoleh kemudian dijadikan matriks *pairwise comparison* untuk setiap kelompok responden. Setelah di rata-rata geometri, data tersebut diolah dengan program *expert choice* dengan tujuan ketepatan dan kecepatan sehingga diketahui prioritas lokal (*local priority*) setiap level dan prioritas global (*global priority*) untuk masing-masing kelompok responden maupun responden secara keseluruhan.

Tabel 4.1 : Prioritas Bidang Pembangunan Lapangan Terbang Perintis

Prioritas	Bidang	Sub Bidang	Bobot Nilai
I	Ekonomi		0.718
		Pendapatan per Kapita	0.295
		P D R B	0.113
		<i>Employment</i>	0.079
		Perdagangan	0.069
		Industri	0.064
		Pariwisata	0.061
		<i>Location Rent</i>	0.038
II	Lain		0.151
		Asesibilitas Lingkungan	0.103
		Ketepatan Waktu Berpergian	0.026
	Kenyamanan Berpergian	0.022	
III	Sosial		0.131
		Pendidikan	0.067
		Transfer Teknologi	0.026
		Akses Informasi	0.024
		Kebanggaan Daerah	0.008
	Keamanan dan Kepercayaan	0.006	

Hasil perhitungan yang diperoleh dapat diterjemahkan pada setiap level hirarki. Setiap level hirarki menunjukkan prioritas dari beberapa pilihan yang diajukan. Level satu menggambarkan persepsi masyarakat terhadap dampak pembangunan lapangan terbang perintis di kabupaten Jember pada bidang ekonomi, sosial dan lainnya. Bidang ekonomi menduduki prioritas pertama dengan bobot nilai 0,718, bidang lainya menempati prioritas kedua dengan bobot nilai 0,151 sedangkan prioritas ketiga diduduki oleh bidang sosial dengan bobot nilai 0,131. (Tabel 4.1)

Hirarki level dua merupakan pendekomposisian dari level satu, juga menunjukkan adanya variasi nilai dari masing masing bidang pada sub bidang yang termasuk dalam kategori bidang ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita merupakan kriteria yang paling di prioritaskan dengan bobot nilai sebesar 0,295 kemudian disusul meningkatkan PDRB pada prioritas kedua dengan bobot nilai sebesar 0,113. *Employment* atau penyerapan tenaga kerja menduduki prioritas ketiga dengan bobot nilai sebesar 0,079. sedangkan 4 kriteria lain yaitu perdagangan, industri, dan pariwisata masing-masing memiliki bobot nilai yang kisarannya tak jauh berbeda yaitu 0,069; 0,064; 0,061 dan *location rent* memiliki bobot nilai yang agak jauh berbeda yaitu 0,038. (Tabel 4.1)

Tiga sub bidang yang termasuk dalam ruang lingkup bidang lainya menunjukkan bahwa aksesibilitas lingkungan merupakan prioritas tertinggi dengan bobot nilai sebesar 0,103. kemudian dua sub bidang lain yaitu waktu berpergian dan kenyamanan berpergian memiliki bobot nilai yang kisarannya tidak jauh berbeda sebesar 0,026 dan 0,022. (Tabel 4.1)

Bidang sosial memiliki lima sub bidang yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki prioritas paling tinggi dengan bobot nilai sebesar 0,067. Sedangkan akses teknologi dan akses informasi berturut-berturut sebagai prioritas kedua dan ketiga dengan bobot nilai 0,026 dan 0,024. kemudian dua sub bidang lain yaitu kebanggaan daerah serta kepercayaan dan keamanan daerah memiliki bobot nilai hampir sama sebesar 0,008 dan 0,006. (Tabel 4.1)

Sintesis tiap level menghasilkan urutan prioritas kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan perencanaan pembangunan lapangan

terbang perintis di Kabupaten Jember. Kebijakan yang paling di prioritaskan adalah kebijakan pembangunan seimbang, yaitu kebijakan aktivitas sektoral termasuk industri, perdagangan dan pertambangan dengan bobot nilai sebesar 0,418. kebijakan kedua adalah kebijakan pertanian yaitu kebijakan yang mendorong aktivitas pertanian termasuk agroindustri dengan bobot nilai sebesar 0,348. kebijakan terakhir adalah kebijakan investasi swasta yaitu kebijakan yang mendorong penanaman modal dengan bobot nilai sebesar 0,234. (Tabel 4.2)

Tabel 4.2 : Prioritas Alternatif Kebijakan Pembangunan Lapangan Terbang Perintis

Prioritas	Kebijakan	Bobot Nilai
I	Pembangunan Seimbang	0.418
II	Pertanian	0.348
III	Investasi Swasta	0.234

4.3 Pembahasan Hasil Perhitungan

Hasil sintesis hirarki mengenai dampak pembangunan lapangan terbang perintis di kabupaten jember menunjukkan bahwa Kabupaten Jember harus menitik beratkan pembangunan daerah pada kebijakan pembangunan seimbang. Hasil sintesis global menunjukkan bahwa bobot nilai yang diperoleh dari kebijakan pembangunan seimbang yaitu sebesar 0,418 mendapatkan prioritas tertinggi dibandingkan dua kebijakan yang lain.

Sesuai dengan teori pembangunan seimbang yang dikemukakan Rosestein-Rodan, pembangunan seimbang memerlukan tingkat investasi yang besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan sebelum usaha pembangunan dilakukan, oleh karena itu strategi pembangunan seimbang disebut sebagai teori dorongan besar-besaran (*big push theory*). Tujuan utama dari kebijakan pembangunan seimbang adalah untuk menciptakan berbagai jenis industri yang berkaitan erat satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi tersebut. Scytovsky mengartikan bahwa eksternalitas ekonomi merupakan jasa-jasa yang

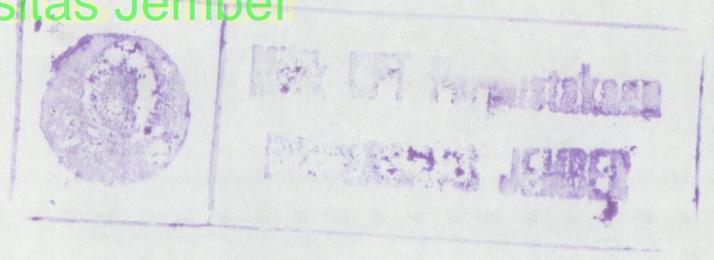
diperoleh dengan percuma oleh suatu industri dari satu atau beberapa industri lainnya.

Lewis menunjukkan bahwa dengan pembangunan seimbang akan diperoleh keuntungan dari terciptanya interdependensi yang efisien diberbagai sektor yaitu sektor pertanian dan sektor industri serta diantara sektor dalam negeri dan luar negeri. Banyak masalah yang akan timbul apabila usaha pembangunan dipusatkan pada satu sektor saja, tanpa adanya keseimbangan pembangunan diantara berbagai sektor, berbagai corak ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi akan timbul sehingga akan memperlambat proses pembangunan.

Untuk mendorong aktivitas diberbagai sektor, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di daerah, misalnya melalui strategi pembangunan, kebijakan makro, kebijakan mikro, penyediaan infrastruktur, pengembangan teknologi, dan lain sebagainya. Dengan dilaksanakannya strategi pembangunan seimbang pada aktivitas sektoral, dimana pada waktu yang bersamaan dilaksanakan pendirian berbagai industri dan penanaman investasi di berbagai industri sehingga dapat memperluas pasar, karena kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari berbagai industri akan menciptakan permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh berbagai industri yang didirikan.

Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember adalah bidang ekonomi, terutama pendapatan perkapita masyarakat dan PDRB serta kesempatan kerja, perdagangan, industri, pariwisata dan pemanfaatan lahan tidur.

Akhirnya, kebijakan pembangunan yang merupakan kebijakan pada aktivitas sektoral tersebut diharapkan dapat mempercepat perkembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Jember sehingga menciptakan kesempatan kerja baru dan meningkatkan kegiatan ekonomi serta taraf hidup masyarakat setempat yang kemudian dengan adanya lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat membawa dampak positif di berbagai bidang kehidupan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian persepsi masyarakat terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan dampak sosial maupun lainnya. Hal ini ditunjukkan dari nilai *eigen value* faktor ekonomi yang paling besar, dibanding kedua faktor lainnya.
2. Sektor-sektor di bidang ekonomi, terutama pendapatan perkapita masyarakat dan PDRB serta kesempatan kerja, perdagangan, industri, pariwisata dan pemanfaatan lahan tidur. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pendapatan per kapita masyarakat dan PDRB menjadi prioritas sektor yang berpotensi dan paling diharapkan.
3. Kebijakan pembangunan seimbang yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan adanya pembangunan lapangan terbang. Kebijakan tersebut didasari kriteria ekonomi, sosial dan lainnya, dimana hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan seimbang menjadi prioritas tertinggi.

5.2 Saran

Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menarik investor, dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan seimbang. Langkah yang perlu dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif yang mampu memberikan jaminan keamanan para investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Ke-3 Cetakan Kesatu*, Yogyakarta: BPSTIE-YKPN
- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta: LPFE-UI
- Basri, Faisal. 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*. Jakarta: Erlangga
- BPS. 2002. *Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember*. Jember
- BPS. 2003. *Pendapatan Domestik Regional Bruto Jawa Timur*. Propinsi Jawa Timur
- Dhanutirto, Haryanto. 1997. "Transportasi Di Indonesia". *Perekonomian Indonesia Memasuki Millennium Ketiga. Vol. Pertama*.
- Ekojaya. 2001. *UU RI No 25 Tahun 2000 Tentang PROPENAS 2000-2004*. Jakarta
- Horonjeff, R. 1993. *Perencanaan Dan Perancangan Bandara udara*. Jakarta: Erlangga
- Jhingan, M.L. 1994. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Kamaludin. Rustian, 1998, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. "Analisis Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Nasional". Jakarta: LPFE-UI

- Kansil, C. 2000. "Analisis Global Perencanaan Pembangunan "Airport" Dan Aspek Keterbatasan". *Jurnal Manajemen Transportasi*. Vol. 01 No:04. Jakarta: STMT Trisakti
- Kunarjo. 1991. *Perencanaan dan Program Pengendalian Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Kustituantio B. Yansekardias. 2001. "Analytic Hierarchy Process (AHP): Sebuah Metode Pembobotan Alternatif Dalam Pembagian Dana Alokasi Umum (DAU). Studi Kasus Di Propinsi Yoyakarta". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol.16 No.3
- Miro, Fidel. 1997. *Sistem Transportasi Kota*. Bandung: Tarsito
- Mulyono, Sri. 1988. "AHP Suatu Metode Baru Yang Serbaguna". *EKI*. Vol. 36 No.3.
- Nasution, M. 1996. *Manajemen Pengangkutan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugraha, R.Aga. 2000. *Alternatif Prioritas Kebijakan Pembangunan Dalam pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 di Kabupaten Jember: penerapan Analytic Hierarchy Process*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Pemda. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 1993/1994-2003/2004*. Jember
- Richardson, H. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta: LPFE-UI
- Saaty, Thomas. 1986. *Axomatic Fondation of The Anayitic Hierarchy Process*. *Management Science* Vol 32. No. 7

.....1991. *Pengambilan Keputusan Bagi Para pemimpin Proses Hirarki Keputusan Dalam Situasi Yang Kompleks*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.

.....1996. *How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process*. Makalah loka karya Aplikasi Metode Kuantitatif. Yogyakarta 5-10 September

Salim, Abbas. 1993. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja graffindo

Sandy, Widy. 2002. *Performasi Dan Pengembangan Human Development Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Analytic Hirarchy Process Study Kasus Kabupaten Jember*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.

Sanusi, Bachrawi. 2000. *Pengantar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: LPFE-UI

Sitanggang. 1999. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Sukirno. Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah dan DasarKebijakan*. Jakarta: LPFE- UI

Sulistiyanti. 2000. "Penentuan Lokasi Dengan Menerapkan *Analytic Hierarchy Process (AHP)*". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.1 No.1*

Suryabrata, S. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjokroamidjojo, Bintoro.1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

Tobondo, B. 1994. *Persepsi Msyarakat Dataran Lindu Terhadap Rencana Pembangunan PLTA Di Palu*. Laporan Penalitian. Tidak Dipublikasikan

Todaro, M. 1987. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga

Zainuddin, R. 1996. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Study Kasus Propinsi Jambi*. Program Studi Ilmu Lingkungan universitas Indonesia. Disertasi. Tidak Dipublikasikan



Lampiran 1

Tabel 1.1
Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Jember
Atas Dasar Harga Konstan '93, Tahun 1999 – 2002

Sektor	1999 Nilai	1999 (%)	2000 Nilai	2000 (%)	2001 Nilai	2001 (%)	2002 Nilai	2002 (%)
1	881.730,32	41,26	921.048,53	41,71	959.155,58	41,97	995.751,62	41,84
2	10.380,95	0,49	10.583,33	0,48	10.844,58	0,47	11.036,80	0,46
3	149.443,99	6,99	152.565,44	6,91	156.277,19	6,84	162.565,00	6,83
4	32.844,80	1,54	34.869,31	1,58	36.773,72	1,61	39.291,06	1,65
5	59.137,93	2,77	59.758,51	2,71	60.638,05	2,65	62.530,95	2,63
6	463.618,06	21,69	478.069,00	21,65	497.007,74	21,75	524.040,03	22,02
7	146.077,54	6,84	149.494,69	6,77	154.515,90	6,76	163.030,78	6,85
8	134.163,12	6,28	136.992,96	6,20	140.152,78	6,13	145.592,58	6,12
9	259.588,54	12,15	264.675,59	11,99	269.847,37	11,81	276.086,47	11,60
PDB	2.136.985,25	100,00	2.208.057,36	100,00	2.285.212,91	100,00	2.397.925,29	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Jember 1999 – 20002

Keterangan : 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Galian 3. Industri Pengolahan
 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 9. Jasa – Jasa

Lampiran 2

Tabel 1.2

Distribusi Persentase PDRB Subsektor Transportasi dan Komunikasi
Berdasarkan Harga Konstan'93, Tahun 1999 – 2002

Angkutan Dan Komunikasi	1999 (Nilai)	1999 (%)	2000 (Nilai)	2000 (%)	2001 (Nilai)	2001 (%)	2002 (Nilai)	2002 (%)
Angkutan Rel	2.604,11	0,12	2.705,02	0,12	2.797,00	0,12	2.955,23	0,13
Angkutan Jalan Raya	120.381,50	5,63	122.899,89	5,57	126.167,61	5,52	132.605,93	5,57
Jasa Penunjang Angkutan	9.190,97	0,43	9.359,57	0,42	15.978,34	0,42	9.989,89	0,42
Komunikasi	13.900,96	0,65	14.530,21	0,66	9.572,95	0,70	17.439,73	0,73

Sumber : BPS PDRB Kabupaten Jember Tahun 1999 – 2002

Lampiran 3

Prioritas Dampak Pembangunan Lapangan Terbang Perintis
Di Kabupaten Jember

Prioritas	Level 1	Rataan	Level 2	Rataan	Level 3	Rataan
I	Ekonomi	0.718			Pembangunan Seimbang	0.418
			Pendapatan per Kapita	0.295		
			P D R B	0.113		
			<i>Employment</i>	0.097		
			Perdagangan	0.069		
			Industri	0.064		
			Pariwisata	0.061		
			<i>Location Rent</i>	0.038		
II	Lainnya	0.151			Pertanian	0.348
			Asesibilitas Lingkungan	0.103		
			Ketepatan Waktu Berpergian	0.026		
			Kenyamanan Berpergian	0.022		
III	Sosial	0.131			Investasi Swasta	0.234
			Pendidikan	0.067		
			Transfer Tcknologi	0.026		
			Akses Informasi	0.024		
			Kebanggaan Daerah	0.008		
			Keamanan dan Kepercayaan	0.006		

Lampiran 4

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Responden
Di Tempat

Dengan Hormat,

Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menangkap aspirasi dari masyarakat ahli (*expert*) dan pemegang kebijakan (*policy maker*) di Kabupaten Jember terhadap perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember. Karena Bapak/Ibu kami anggap sebagai ahli dalam masalah tersebut, maka kesediaan Bapak/ibu merupakan bantuan yang sangat berarti terhadap hasil penelitian ini.

Pengisian kuesioner ini merupakan salah satu tahapan penelitian untuk mengetahui secara kuantitatif terhadap perencanaan pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember. Perlu diketahui bahwa hasil penelitian ini hanya digunakan sebagai bahan pembuatan tugas akhir Strata Satu (Skripsi) pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Judul skripsi tersebut adalah "**Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Di kabupaten Jember Dengan Pendekatan *Analytic Hierarchy Process***".

Kesungguhan dalam mengisi kuesioner ini akan menjadikan hasil penelitian yang memiliki validitas tinggi untuk dimanfaatkan bagi pembangunan Nasional terutama bagi kemajuan Kabupaten Jember tercinta. Kami mengucapkan Terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner ini. Semoga sukses selalu menyertai Bapak / Ibu.

Jember, Agustus 2004

Hormat Kami,

(D e l i a n t i)

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Metode *Analytic Hirarchy Process* (AHP) memiliki kuesioner yang berbeda dari metode penelitian lain. Kuesioner metode ini mencoba menangkap persepsi masyarakat yang di anggap ahli (*expert*) atau pemegang kebijakan (*policy maker*) dibidang atau permasalahan yang diteliti. Berikut ini adalah petunjuk pengisian kuesioner penelitian ini:

Bapak / Ibu hanya diminta untuk menjawab pertanyaan dengan cara **membandingkan secara berpasangan** setiap kriteria terhadap kriteria lain yang sehubungan dengan tujuan penelitian. Perbandingan antara dua elemen kriteria tersebut menggunakan skala preferensi (penilaian) sebagai berikut:

Skala	Definisi	Keterangan
1	<u>Sama-sama</u> Diharapkan / penting	Kriteria A dan B <u>sama-sama</u> Diharapkan / pentingnya
3	<u>Cukup sedikit</u> Diharapkan / penting	Kriteria A <u>cukup sedikit</u> Diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
5	<u>Lebih</u> Diharapkan / penting	Kriteria A <u>lebih</u> disukai Diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
7	<u>Sangat</u> Diharapkan / penting	Kriteria A <u>Sangat</u> Diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
9	<u>Mutlak</u> Diharapkan / penting	Kriteria A <u>Mutlak</u> Diharapkan / penting dibandingkan Kriteria B
2,4,6,8	Nilai-nilai antara	Jika ragu-ragu dalam memilih skala, misalkan memilih sangat Diharapkan atau mutlak disukai
Resiprokal	Jika A dibanding B adalah, katakanlah skala 7, maka B dibanding A adalah skala 1 / 7	Asumsi yang masuk akal

Misalkan kita akan membeli sebuah mobil, maka ada beberapa kriteria yang menentukan, yaitu:

- A. Model
- B. Keandalan mesin
- C. Efisiensi bahan bakar

Bentuk dan cara menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menandai skala-skala yang disediakan. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

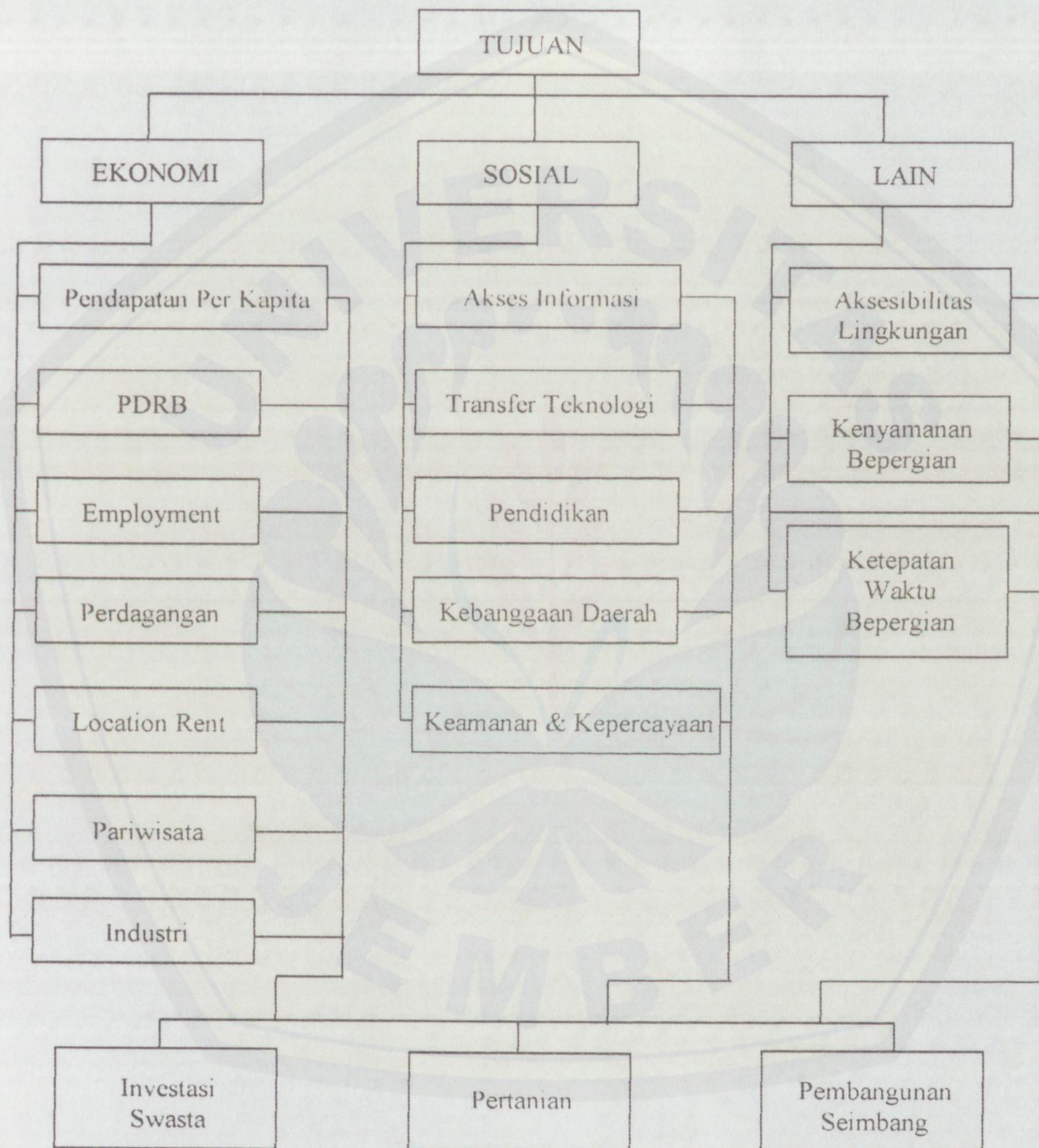
PERTANYAAN : Jika anda ingin membeli mobil, kriteria manakah yang paling diprioritaskan dalam memilih mobil?

Model (A)	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Keandalan mesin (B)
Model (A)	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Efisiensi bahan bakar (C)
Keandalan mesin (B)	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Efisiensi bahan bakar (C)

Keterangan dan maksud jawaban:

- 1) Keandalan mesin (B) agak lebih penting dibanding model (A)
- 2) Model (A) sedikit lebih penting dibanding efisiensi bahan bakar (C)
- 3) Keandalan mesin (B) sama pentingnya dengan efisiensi bahan bakar (C)

HIRARKI
PEMBANGUNAN LAPANGAN TERBANG PERINTIS
DI KABUPATEN JEMBER



KETERANGAN HIRARKI

Hirarki Level 1

Bidang-bidang yang berpengaruh terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember :

1. EKONOMI
2. SOSIAL
3. LAIN-LAIN

Hirarki Level 2

Faktor-Faktor yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Jember terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember :

1. Pendapatan Per Kapita : Meningkatkan Pendapatan Per Kapita masyarakat di Kabupaten Jember
2. PDRB : Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Jember
3. *Employment* : Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember
4. Perdagangan : Memperlancar perdagangan dalam dan luar negeri di Kabupaten Jember
5. *Location Rent* : Meningkatkan nilai interregional karena faktor lokasi di Kabupaten Jember
6. Pariwisata : Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Jember
7. Industri : Pendirian Industri – Industri baru di Kabupaten Jember
8. Akses Informasi : Mempermudah dan memperlancar akses informasi / komunikasi di Kabupaten Jember
9. Transfer Teknologi : Proses transfer teknologi sebagai penunjang produktifitas di Kabupaten Jember

10. Pendidikan : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas Pendidikan yang ada di Kabupaten Jember
11. Kebanggaan daerah : Menjadi kebanggaan daerah Kabupaten Jember
12. Keamanan dan kepercayaan : Menjaga keamanan dan kepercayaan Kabupaten Jember
13. Aksesibilitas Lingkungan : Meningkatkan aksesibilitas lingkungan di Kabupaten Jember
14. Kenyamanan berpergian : Rasa nyaman dalam berpergian
15. Ketepatan waktu berpergian : Ketepatan / kecepatan waktu yang ditempuh dalam perjalanan berpergian

Hirarki Level 3

Alternatif Kebijakan yang dianggap penting terhadap pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember:

1. Investasi swasta : Kebijakan yang mendorong penanaman investasi swasta di Kabupaten Jember
2. Pertanian : Kebijakan yang mendorong aktivitas pertanian, termasuk Agroindustri di Kabupaten Jember
3. Pembangunan Seimbang : Kebijakan pada aktivitas sektoral, termasuk industri, pertambangan, perdagangan

B.2 Menurut Bapak / Ibu kebijakan pembangunan manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat **meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Jember?**

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

B.3 Menurut Bapak / Ibu kebijakan pembangunan manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat **meningkatkan PDRB Kabupaten Jember?**

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

B.4 Menurut Bapak / Ibu kebijakan pembangunan manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat **menyerap tenaga kerja di Kabupaten Jember?**

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

B.5 Menurut Bapak / Ibu kebijakan pembangunan manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat **memperlancar arus perdagangan dalam dan luar negeri di Kabupaten Jember?**

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

B.6 Menurut Bapak / Ibu kebijakan pembangunan manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat **meningkatkan *location rent*** yang ada di Kabupaten Jember?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

B.7 Menurut Bapak / Ibu kebijakan pembangunan manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat **mengembangkan kepariwisataan** yang ada di Kabupaten Jember?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

B.8 Menurut Bapak / Ibu kebijakan pembangunan manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat **mendirikan industri – industri baru** di Kabupaten Jember?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

C. BIDANG SOSIAL

C.1 Menurut Bapak / Ibu faktor manakah di Bidang Sosial yang paling berpengaruh dan paling diharapkan masyarakat Kabupaten Jember dengan adanya pembangunan lapangan terbang di kabupaten Jember?

Akses Informasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Transfer Teknologi
Akses Informasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pendidikan
Akses Informasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kebanggaan Daerah
Akses Informasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Keamanan dan Kepercayaan
Transfer Teknologi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pendidikan
Transfer Teknologi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kebanggaan Daerah
Transfer Teknologi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Keamanan dan Kepercayaan
Pendidikan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kebanggaan Daerah
Pendidikan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Keamanan dan Kepercayaan
Kebanggaan Daerah	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Keamanan dan Kepercayaan

C.2 Menurut Bapak / Ibu kebijakan yang manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat mempermudah dan memperlancar akses informasi / komunikasi di Kabupaten Jember?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

C.3 Menurut Bapak / Ibu kebijakan yang manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat memproses transfer teknologi di Kabupaten Jember?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

D.2 Menurut Bapak / Ibu kebijakan yang manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember dapat mengaksisibilitas lingkungannya?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

D.3 Menurut Bapak / Ibu kebijakan yang manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember masyarakat dapat merasakan kenyamanan dalam berpergian?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

D.4 Menurut Bapak / Ibu kebijakan yang manakah yang harus ditempuh agar dengan adanya pembangunan lapangan terbang perintis di Kabupaten Jember masyarakat bisa mendapatkan ketepatan/kecepatan waktu dalam berpergian?

Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pertanian
Investasi Swasta	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang
Pertanian	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pembangunan Seimbang

Nama Responden	
Jabatan	
Instansi	
Tanda Tangan	